

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALINAU
NOMOR : 278/DPRD/ 2024
910/224/HUKUM
TANGGAL 13 AGUSTUS 2024
TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Wempi W. Mawa, SE.,M.H
Jabatan : Bupati Malinau
Alamat kantor : Jl. Pusat Pemerintahan (Kantor Bupati Malinau)
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Malinau
2. a. Nama : Ping Ding
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Malinau
Alamat kantor : Jl. Pusat Pemerintahan (Kantor DPRD Malinau)
b. Nama : Bilung Ajang, AP
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Malinau
Alamat kantor : Jl. Pusat Pemerintahan (Kantor DPRD Malinau)
c. Nama : Yohana Liu, A.Md
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Malinau
Alamat kantor : Jl. Pusat Pemerintahan (Kantor DPRD Malinau)

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah

Daerah untuk sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Malinau, 13 Agustus 2024



BUPATI MALINAU

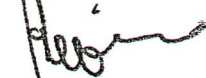
Selaku
PIHAK PERTAMA



WEMPI W. MAWA, SE., M.H

**PIMPINAN DPRD
KABUPATEN MALINAU**

Selaku
PIHAK KEDUA



PING DING
KETUA



BILUNG AJANG, AP
WAKIL KETUA I



YOHANA LIU, A.MD
WAKIL KETUA II

DAFTAR ISI

	Hal.
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
 BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	4
 BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH	8
2.1 Pendapatan Daerah	9
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah	9
2.1.2 Pendapatan Transfer.....	12
2.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah	15
 BAB III PERUBAHAN PRIORTIAS BELANJA DAERAH	18
 BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	24
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan ...	24
4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan.....	27
4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Bantuan Keuangan	28
4.3.1 Belanja Pegawai	29
4.3.2 Belanja Barang dan Jasa	29
4.3.3 Bantuan Subsidi.....	30
4.3.4 Belanja Hibah	30
4.3.5 Bantuan Sosial.....	31
4.3.6 Belanja Modal.....	32
4.3.7 Belanja Tidak Terduga	33
4.3.8 Belanja bagi Hasil	34

	4.3.9 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan desa dan Lainnya	34
BAB V	RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	37
BAB VI	PENUTUP	40

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Target Pendapatan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024.....	16
Tabel 3.1	Sasaran Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2024.....	21
Tabel 4.1	Plafon Anggaran Sementara Perubahan Untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Bantuan Keuangan Tahun 2024 ...	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan-PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Perubahan PPAS disusun dengan berpedoman pada Perubahan Kebijakan Umum APBD. Selanjutnya KUPA dan Perubahan PPAS menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD sebelum ditetapkan menjadi Perubahan APBD.

Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Dari sisi aspek keuangan daerah, APBD merupakan dokumen inti yang sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada Pasal 161 Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan
- d. Keadaan darurat; dan/atau
- e. Keadaan luar biasa.

Penyusunan dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dimaksudkan guna menjaga kesinambungan serta sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan-PPAS) tahun 2024 adalah memuat program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan untuk setiap program/kegiatan yang dilaksanakan.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan-PPAS) Kabupaten Malinau Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran melalui penyesuaian program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sisa waktu

pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berjalan apabila melampaui asumsi KUA yang ditetapkan sebelumnya;

2. Menyediakan dokumen yang memuat perubahan target dan pendapatan dan penerimaan daerah, belanja daerah serta target pembiayaan daerah;
3. Menyediakan dokumen yang berisi plafon anggaran sementara Perubahan berdasarkan perangkat daerah, urusan pemerintahan dan program kegiatan;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah;
5. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan (Perubahan RKPD), penganggaran (Perubahan KUA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS), (Perubahan APBD), pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik tingkat pusat, provinsi maupun Kabupaten/Kota.
6. Sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rancangan APBD Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2024.

1.3 Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan-PPAS) Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 Tahun 2004);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang -undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
20. Peraturan Bupati Malinau 27 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 Nomor 27).
21. Peraturan Bupati Malinau Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024.

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Sesuai dengan perubahan asumsi ekonomi dan perubahan kebijakan pendapatan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024, rencana perubahan pendapatan daerah berisikan tentang rencana pendapatan daerah sebelum perubahan dan rencana pendapatan daerah setelah perubahan baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah dijelaskan bahwa "Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Sedangkan penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pendapatan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 29 - Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Penjelasan masing-masing pos pendapatan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang merupakan pendapatan daerah yaitu pajak daerah ,hasil retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Adanya desentralisasi memberi kesempatan pada daerah untuk meningkatkan potensi pendapatannya tanpa tergantung pada pusat diwujudkan melalui pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu pemberian sumber – sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensi daerah. Rencana Pendapatan asli Daerah pada Perubahan tahun 2024 sebesar **Rp. 64.588.114.129,- (Enam Puluh Empat Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Belas Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah)** dimana sebelum perubahan dianggarkan sebesar **Rp. 61.768.670.758,- (Enam Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh**

Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), yang bersumber dari:

a. Pajak Daerah

Penetapan target pajak daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah. Kewenangan Daerah untuk memungut pajak diatur pelaksanaannya pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah. Jenis pajak yang dipungut Pemerintah Kabupaten Malinau sebanyak 7 (tujuh) jenis, yaitu : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan, dan BPHTB. Berdasarkan potensi pajak dan memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 maka Rencana Perubahan pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024 sebesar **Rp. 15.135.396.658,- (Lima Belas Miliar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)** dimana sebelum perubahan dianggarkan sebesar **Rp. 14.985.396.658,- (Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)**

b. Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 telah mengatur tentang Retribusi Daerah, adapun komponen-komponen dari retribusi daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi perizinan Tertentu. Berdasarkan penerimaan Tahun 2022, dan 2023

maka rencana Perubahan penerimaan hasil Retribusi Daerah Tahun 2024 sebesar **Rp. 2.633.005.100,- (Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ribu Seratus Rupiah)** dimana sebelum perubahan dianggarkan sebesar **Rp. 1.973.274.100,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah)**

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan yang sah terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah/BUMD. Maka pada tahun Perubahan 2024 rencana penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan sebesar **Rp. 3.620.000.000,- (Tiga Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)** dimana sebelum perubahan dianggarkan sebesar **Rp. 3.600.000.000,- (Tiga Miliar Enam Ratus Juta Rupiah)**

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pos pendapatan dari penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Sumber-sumber pendapatan lain-lain PAD yang sah berasal dari Penerimaan Jasa Giro Atas Kas Daerah, Penerimaan dari Bunga Deposito, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. berdasarkan penerimaan Tahun 2022 dan 2023, maka rencana Perubahan pendapatan Lain-lain PAD yang sah Tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 43.199.712.371,- (Empat Puluh Tiga Miliar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Tiga**

Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) dimana sebelum perubahan dianggarkan **Rp. 41.210.000.000,- (Empat Puluh Satu Miliar Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah)**

2.1.2 Pendapatan Transfer

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pendapatan Daerah, Pendapatan Transfer terdiri dari :

a. Transfer Pemerintah Pusat

1) Dana Perimbangan

a) Dana Transfer Umum (DBH, DAU)

b) Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik)

2) Dana Insentif Daerah

3) Dana Otonomi Khusus

4) Dana Keistimewaan;

5) Dana Desa.

b. Transfer Antar-Daerah

1) Pendapatan Bagi Hasil

2) Bantuan Keuangan.

Pada Perubahan Kebijakan Umum APBD tahun 2024 target penerimaan Transfer dari Pemerintah Pusat yang dianggarkan dalam RAPBD tidak memperhitungkan pendapatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) , sesuai ketentuan Pemendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD bahwa Pendapatan DAK dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi

mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Perubahan pendapatan terjadi pada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer pusat, pendapatan transfer daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai berikut :

- a. Pajak Daerah sebesar **Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)** yang terdiri dari pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, dan PBBP2;
- b. Retribusi Daerah sebesar **Rp. 659.731.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)** dimana terdapat penambahan pada retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar **Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)** dimana terdapat penambahan pada deviden atas penyertaan modal pada BUMD;
- d. Lain-lain PAD yang Sah sebesar **Rp. 1.989.712.371,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah)** terdapat penambahan pada jasa giro dan pendapatan BLUD;
- e. Dana Bagi Hasil sebesar **Rp. 551.073.603.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Satu Miliar Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Ribu Rupiah)** yang terdiri dari DBH Pajak Bumi dan Bangunan, DBH Pph Pasal 21, DBH Pph Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN, DBH SDA Minyak

Bumi, DBH SDA Gas Bumi, DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent, dan DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalti;

- f. Bantuan Keuangan sebesar **Rp. 19.546.985.296,- (Sembilan Belas Miliar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah)** yang terdiri Bantuan Keuangan Khusus dan Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi;
- g. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar **Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)** penambahan pada pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Rencana penerimaan dana Transfer Pemerintah Pusat pada Perubahan APBD Tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 2.834.299.870.000,- (Dua Triliun Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)** sebelumnya dianggarkan sebesar **Rp. 2.283.226.267.000,- (Dua Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah)** Sedangkan pendapatan Transfer Antar Daerah pada Perubahan 2024 sebesar **Rp. 60.259.184.282,- (Enam Puluh Miliar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah)** sebelumnya dianggarkan sebesar **Rp. 40.712.198.986,- (Empat Puluh Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).**

2.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Pada Perubahan Tahun anggaran 2024 Rencana Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kabupaten Malinau bersumber dari lain-lain pendapatan sebesar **Rp. 6.500.000.000,- (Enam Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)** sebelumnya dianggarkan sebesar **Rp. 6.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah)**

Untuk lebih rinci perkiraan Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Target Pendapatan Perubahan
Tahun Anggaran 2024

KODE REK.	URAIAN	APBD SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	%		Dasar Hukum
1	2	3	3	3			4
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.391.707.136.744	2.965.647.168.411	573.940.031.667	24.00		
4.1	Pendapatan Asli Daerah	61.768.670.758	64.588.114.129	2.819.443.371	4,56		
4.1.01	Pajak Daerah	14.985.396.658	15.135.396.658	150.000.000	1,00	*	Undang-Undang no. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
						*	Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
						*	Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
4.1.02	Retribusi Daerah	1.973.274.100	2.633.005.100	659.731.000	33,43	*	Undang-Undang no. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
						*	Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.600.000.000	3.620.000.000	20.000.000	0,56	*	Permendagri No. 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah
						*	Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Malinau kepada Perumda Intimung
						*	Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2019 tentang Penambahan penyertaan Modal Pemerintah Kab. Malinau kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum APA MENING
						*	Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Kab. Malinau No. 3 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Malinau kepada Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Malinau

4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	41.210.000.000	43.199.712.371	1.989.712.371	4,83	*	Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.323.938.465.986	2.894.559.054.282	570.620.588.296	24,55		
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	2.283.226.267.000	2.834.299.870.000	551.073.603.000	24,14	*	Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024
4.2.02	Transfer Antar Daerah	40.712.198.986	60.259.184.282	19.546.985.296	48,01	*	SK Gubernur No. 188,44/K.45/2024 tentang Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023
						*	SK. Gubernur No. 188.44/K.37/2024 tentang Penetapan Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	6.000.000.000	6.500.000.000	500.000.000	8,33		
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	-	-			
4.3.02	Dana Darurat	-	-	-			
4.3.03	Lain-lain Pendapatan	6.000.000.000	6.500.000.000	500.000.000	8,33	*	Permendagri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH						

Sumber : BPKD 2024

BAB III

PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan-APBD) disusun dengan prioritas belanja daerah yang merupakan implementasi dari prioritas pembangunan yang tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan-RKPD) Kabupaten Malinau. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka peningkatan di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Dalam rencana penggunaan Perubahan APBD Tahun 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau memfokuskan pada kegiatan untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan desa. Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau telah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks

daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Selain itu prioritas pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2024 juga disusun dengan berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dirumuskan dalam sub bab diatas maupun bab-bab terdahulu.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Tema pembangunan Kabupaten Malinau yang diusung pada tahun 2024 adalah **“ Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tata Kelola Pemerintahan dan Infrastruktur yang Mendukung Penguatan Ekonomi Menuju Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan”**

Dimana prioritas Pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menurunkan angka kemiskinan.
2. Penguatan ekonomi lokal dan iklim investasi untuk pemulihan ekonomi.
3. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM untuk menghadapi persaingan global.
4. Peningkatan infrastruktur untuk mendukung peran dan daya saing daerah.
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

6. Meningkatnya penataan kawasan desa yang rapi, tertib, bersih, sehat, indah dan harmonis yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Dan kemudian juga memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masa jabatan 2021-2026 dimana proses Penyusunan RPJMD masih berlangsung pada saat dokumen ini disusun. Visi dan Misi Kabupaten Malinau pada Tahun 2021-2026 adalah Visi " Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang profesional "

Misi :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul;
2. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi daerah, karakteristik dan kearifan lokal;
3. Mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan

Tabel 3.1
Sasaran dan Indikator Sasaran Serta Target Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Capaian 2020 (sesuai RPJMD 2021-2026)	Tahun 2022			Tahun 2023		Tahun 2024	
				Target RPJMD	Target RKPD	Capaian 2022	Target RPJMD	Target RKPD	Target RPJMD	Target RKPD
1.	Meningkatnya Produktifitas sektor-sektor Ekonomi Primer berorientasi pada Potensi dan Karakteristik Lokal	Kontribusi Pertanian terhadap PDRB	3,79 %	4,82%	4,82%	3,130 %	4,9 %	4,9 %	4,92 %	4,92 %
2.	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata yang berorientasi pada Potensi dan Karakteristik Wilayah	Kontribusi Industri, Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB	2,56 %	2,70 %	2,70 %	2.845 %	2,70 %	2,70 %	2,80 %	2,845 %
		Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	1,82 %	1,84 %	1,84 %	2.00 %	1,84 %	1,84 %	1,85 %	2,00 %
3.	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi Daerah	92,07 milyar Rp	90,5 Milyar Rp	90,5 Milyar Rp	belum rilis (BPS)	91,1 Milyar Rp	91,1 Milyar Rp	92 Milyar Rp	92 Milyar Rp
4.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	71,45 tahun	71,94 tahun	71,94 tahun	71,50 tahun	72,05 tahun	72,05 tahun	72,16 tahun	72,16 tahun
5.	Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	9,39 tahun	9,50 Tahun	9,50 Tahun	9,41 Tahun	9,67 Tahun	9,67 Tahun	9,97 Tahun	9,97 Tahun
6.	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita	Rp 9.611.000,00	Rp 10.150.000,00	Rp 10.150.000,00	Rp 10.304.000,00	Rp 10.300.000,00	Rp 10.300.000,00	Rp 10.450.000,00	Rp 10.450.000,00
7.	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi serta Usaha Kecil dan Mikro yang berkualitas	Persentase Peningkatan Koperasi Berkualitas	65 %	70 %	70 %	72,4 %	72 %	72 %	74 %	74 %
		Persentase peningkatan Usaha Mikro dan Kecil	52,50%	70,60 %	70,60 %	81,90%	73,30 %	73,30 %	76,60 %	81,90 %

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Capaian 2020 (sesuai RPJMD 2021-2026)	Tahun 2022			Tahun 2023		Tahun 2024	
				Target RPJMD	Target RKPD	Capaian 2022	Target RPJMD	Target RKPD	Target RPJMD	Target RKPD
8.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	70,78 poin	73,65 poin	73,65 poin	67,25	75,09 poin	75,09 poin	76,52 poin	76,52 poin
9.	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,08 %	4,14 %	4,14 %	3,30 %	4,10 %	4,10 %	4,09 %	3,20 %
10.	Meningkatnya Kualitas dan Akses Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	49,70 %	50 %	50 %	12,16 %	52,10 %	52,10 %	54,80 %	54,80 %
		Persentase Pemukiman yang Layak	73,07 %	77 %	77 %	81,16 %	79 %	79 %	80 %	81,16 %
		Rasio Rumah Layak Huni	1 : 1,082	1 : 1,074	1 : 1,074	1 : 1,150	1 : 1,071	1 : 1,071	1 : 1,068	1 : 1,068
		Persentase Desa yang terhubung Moda Transportasi	60 %	65 %	65 %	65 %	70 %	70 %	75 %	75 %
		Persentase Penduduk berakses Air Minum	57 %	67 %	67 %	78,83 %	72 %	72 %	77 %	78,83 %
		Persentase Irigasi Kabupaten yang berfungsi	25,78 %	28,01 %	28,01 %	23,87 %	30,34 %	30,34 %	32,46 %	32,46 %
11.	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi yang membuka keterisolasian daerah	Persentase Desa yang terlayani Telekomunikasi	95,41 %	96,33 %	96,33 %	96,33 %	97,25 %	97,25 %	98,17 %	98,17 %
12.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	56,32	64,20	64,20	60,02	67,10	67,10	69,15	69,15
		Nilai LPPD	2,087	2,930	2,930	N/A	2,950	2,950	2,960	2,960
13.	Terselenggaranya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14.	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	4 %	5 %	5 %	4,07 % (BLUD)	5,5 %	5,5 %	6,00 %	6,00 %
15.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	78,28	81	81	83,35 (Ombudsman)	85	85	88	88
16.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan berbasis Desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	8,26 %	13,76 %	13,76 %	13,76 %	15,59 %	15,59 %	17,74 %	17,74 %
17.		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (nilai angka 0-100)	100 poin	100 poin	100 poin	100 poin	100 poin	100 poin	100 poin	100 poin

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Capaian 2020 (sesuai RPJMD 2021-2026)	Tahun 2022			Tahun 2023		Tahun 2024	
				Target RPJMD	Target RKPD	Capaian 2022	Target RPJMD	Target RKPD	Target RPJMD	Target RKPD
	Meningkatnya Kualitas Lahan, Air dan Udara	Indeks Kualitas Air (nilai angka 0-100)	50 poin	53,65 poin	53,65 poin	62,38 poin	53,75 poin	53,75 poin	53,85 poin	62,38 poin
		Indeks Kualitas Udara (nilai angka 0-100)	94 poin	91,25 poin	91,25 poin	95,20 poin	91,36 poin	91,36 poin	91,47 poin	95,20 poin
18.	Terciptanya Kehidupan yang Aman, Tenteram, dan Harmonis serta Bebas Bencana	Angka Kriminalitas	0,69 %	0,58 %	0,58 %	0,54 %	0,55 %	0,55 %	0,45 %	0,45 %
		Indeks Resiko Bencana	124,4 poin	124,4 poin	124,4 poin	155,85 poin	124,4 poin	124,4 poin	124,4 poin	124,4 poin
19.	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	81,36 poin	83,36 poin	83,36 poin	82,61 poin	84,36 poin	84,36 poin	85,36 poin	85,36 poin
20.	Mantapnya Kehidupan Keagamaan serta Karakter Budaya Masyarakat	Indeks Kerukunan Beragama	78 poin	79,25 poin	79,25 poin	yg ada angka capaian Kaltara 2022 : 80,95 poin	80,6 poin	80,6 poin	81,7 poin	81,7 poin
		Indeks Pembangunan Kebudayaan/Masyarakat	76,5 poin	78,5 poin	78,5 poin	yg ada angka capaian kaltara 2021 : 50,08 poin	79,5 poin	79,5 poin	80,5 poin	80,5 poin

Sumber : RKPD Tahun 2024.

BAB IV

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terdapat perubahan pada target pendapatan sehingga target belanja daerah juga mengalami perubahan. Substansi dokumen Perubahan PPAS yang didasarkan pada Perubahan RKPD dan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 dikelompokkan berdasarkan Urusan Pemerintahan dan plafon anggaran Perangkat Daerah berdasarkan program dan kegiatan prioritas.

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Usuran Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah telah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana diatur bahwa urusan pemerintahan dibagi menjadi dua yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar serta Urusan Pemerintahan Pilihan. Selanjutnya kedua urusan tersebut dijabarkan ke dalam urusan yang dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdiri atas:

a. Urusan pemerintahan wajib

Usuran pemerintahan wajib terdiri atas:

- 1) urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi:
 - a) pendidikan;
 - b) kesehatan;
 - c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f) sosial.
- 2) urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi:
 - a) tenaga kerja;
 - b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c) pangan;
 - d) pertanahan;
 - e) lingkungan hidup;
 - f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i) perhubungan;
 - j) komunikasi dan informatika;

- k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l) penanaman modal;
 - m) kepemudaan dan olah raga;
 - n) statistik;
 - o) persandian;
 - p) kebudayaan;
 - q) perpustakaan; dan
 - r) kearsipan.
- b. Urusan pemerintahan pilihan urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi:
- 1) kelautan dan perikanan;
 - 2) pariwisata;
 - 3) pertanian;
 - 4) kehutanan;
 - 5) energi dan sumber daya mineral;
 - 6) Perdagangan;
 - 7) perindustrian; dan
 - 8) transmigrasi.
- c. Unsur pendukung, meliputi:
- 1) sekretariat Daerah; dan
 - 2) sekretariat DPRD.
- d. Unsur penunjang, meliputi:
- 1) perencanaan;

- 2) keuangan;
 - 3) kepegawaian;
 - 4) pendidikan dan pelatihan;
 - 5) penelitian dan pengembangan;
 - 6) penghubung; dan
 - 7) pengelolaan perbatasan daerah.
- e. Unsur pengawas yaitu inspektorat;
- f. Unsur kewilayahan, meliputi:
- 1) kabupaten/kota administrasi; dan
 - 2) kecamatan.
- g. Unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan
- h. Unsur kekhususan.

Belanja daerah Kabupaten Malinau diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun plafon anggaran sementara untuk masing-masing urusan pemerintahan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tersaji dalam tabel 4.1 yang dilampirkan pada dokumen ini.

4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan

Belanja Daerah menurut Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program dan Kegiatan

rinciannya paling sedikit mencakup target dan sasaran, indikator capaian Keluaran dan indikator capaian Hasil. Nomenklatur Program dalam Belanja Daerah serta indikator capaian Hasil dan indikator capaian keluaran didasarkan pada prioritas nasional disusun berdasarkan nomenklatur Program dan pedoman penentuan indikator Hasil dan indikator Keluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun anggaran 2024 prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan belanja program dan kegiatan sebesar **Rp. 3.383.469.344.343,66 (Tiga Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah Enam Puluh Enam Sen)** mengalami kenaikan sebesar **Rp. 193.825.083.204,66 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Rupiah Enam Puluh Enam Sen)** dibandingkan sebelum Perubahan APBD 2024 sebesar **Rp. 3.189.644.261.139,- (Tiga Triliun Seratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah)** untuk rincian secara lengkap, Tabel alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program pembangunan menurut masing-masing perangkat daerah terlampir dalam dokumen ini.

4.3. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial , Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Bantuan Keuangan

4.3.1. Belanja pegawai

Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Alokasi Perubahan Belanja Pegawai Tahun 2024 sebesar **Rp. 775.672.660.828,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah)** mengalami Kenaikan sebesar **Rp. 10. 032.666.653,- (Sepuluh Miliar Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah)** dibandingkan sebelum perubahan sebesar **Rp. 765.639.994.175,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)** belanja pegawai sudah memperhitungkan antisipasi rencana kenaikan gaji PNS dan PPPK, pembayaran gaji, tunjangan CPNS, tunjangan Pejabat Fungsional dan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) PNS dan PPPK, Gaji Ketiga belas dan THR pegawai.

4.3.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa berupa penyediaan barang dan jasa sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Alokasi Perubahan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 sebesar **Rp. 898.047.625.167,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh**

Tujuh Rupiah) mengalami Kenaikan sebesar **Rp. 48.617.107.623,-** **(Empat Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah)** dibandingkan sebelum perubahan sebesar **Rp. 849.430.517.544,-** **(Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).**

4.3.3. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi merupakan bantuan yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat baik dalam bentuk Tunai, Barang Maupun Jasa dalam rangka mensejahterakan masyarakat yang fungsinya untuk memberikan potongan harga lebih rendah dari harga dasar agar harga jual dari produknya dapat terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Belanja Subsidi Tahun 2023 dialokasikan untuk Subsidi Rasda (Beras Daerah) kepada masyarakat miskin sesuai data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM). Belanja Subsidi perubahan Tahun 2024 tidak mengalami perubahan yaitu tetap sebesar **Rp. 57.621.101.840,- (Lima Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah).**

4.3.4. Belanja Hibah

Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mekanisme pemberian dana hibah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah daerah juga harus mengalokasikan bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2018. Alokasi belanja hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, pada perubahan tahun 2024 dianggarkan sebesar **Rp. 139.070.533.754,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah)** mengalami kenaikan sebesar **Rp. 11.067.919.184,- (Sebelas Miliar Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Empat Rupiah)** dibandingkan sebelum perubahan sebesar **Rp. 128.002.614.570,- (Seratus Dua Puluh Delapan Miliar Dua Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah).**

4.3.5. Belanja Bantuan sosial

Bantuan sosial diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang diberikan kepada kelompok atau anggota masyarakat secara selektif dan tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi. Alokasi untuk perubahan belanja bantuan sosial sebesar **Rp. 35.063.833.504,- (Tiga Puluh Lima Miliar Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat**

Rupiah) mengalami kenaikan sebesar **Rp. 14.654.449.800,- (Empat Belas Miliar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribuan Delapan Ratus Rupiah)** dibandingkan sebelum perubahan sebesar **Rp. 20.409.383.704,- (Dua Puluh Miliar Empat Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribuan Tujuh Ratus Empat Rupiah).**

4.3.6 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alokasi Perubahan Belanja Modal Tahun 2024 sebesar **Rp. 962.544.565.247,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Miliar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribuan Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah)** mengalami kenaikan sebesar **Rp. 61.151.131.089,- (Enam Puluh Satu Miliar Seratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribuan Delapan Puluh Sembilan Rupiah)** dibandingkan sebelum perubahan sebesar

Rp. 901.393.434.158,- (Sembilan Ratus Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah).

4.3.7. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Anggaran belanja tidak terduga dianggarkan secara rasional dan merupakan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa atau tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan. Besaran prioritas plafon anggaran sementara perubahan untuk belanja tidak terduga pada Perubahan tahun 2024 sebesar **Rp. 195.579.225.704,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah)** mengalami kenaikan sebesar **Rp. 48.301.808.855,66 (Empat Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Satu Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah Enam Puluh Enam Sen)** dibandingkan sebelum perubahan sebesar **Rp. 147.277.416.848,- (Seratus Empat Puluh**

Tujuh Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).

Rincian plafon anggaran sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga tersebut diatas dapat dilihat pada tabel berikut.

4.3.8. Belanja Bagi Hasil

Pemerintah Kabupaten Malinau mengalokasikan dana bagi hasil kepada pemerintah desa pada tahun 2024 sebesar **Rp. 1.498.539.600,- (Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah)** dimana tidak terjadi perubahan pada Perubahan APBD 2024.

4.3.9. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa dan Lainnya

Pemerintah Kabupaten Malinau mengalokasikan dana Gerdema dan dana RT Bersih kepada pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dari dana transfer yang akan diterima dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 202.037.910.700,- (Dua Ratus Dua Miliar Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah).**

Selain itu, dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten

Malinau harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan alokasi Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 116.333.348.000,- (Seratus Enam Belas Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).**

Plafon Anggaran Sementara perubahan rincian belanja 2024 dapat kita lihat pada tabel di bawah sebagai berikut :

Tabel . 4.1

Perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	APBD 2024 (Rp)	Plafon Anggaran Sementara Perubahan (Rp)
1	Belanja Pegawai	765.639.994.175	775.672.660.828
2	Belanja Barang dan Jasa	849.430.517.544	898.047.625.167
3	Belanja Subsidi	57.621.101.840	57.621.101.840
4	Belanja Hibah	128.002.614.570	139.070.533.754
5	Belanja Bantuan Sosial	20.409.383.704	35.063.833.504
6	Belanja Modal	901.393.434.158	962.544.565.247
7	Belanja Tidak Terduga	147.277.416.848	195.579.225.703,66
8	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	1.498.539.600	1.498.539.600
8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa	318.371.258.700	318.371.258.700
Jumlah Belanja		3.189.644.261.139	3.383.469.344.343,66

BAB V

RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus, defisit dapat ditutup dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bahwa Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Adapun jenis-jenis pembiayaan daerah yaitu penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Sesuai dengan fungsinya dalam penganggaran daerah, maka pembiayaan daerah bertujuan untuk mengalokasikan/menutupi surplus/defisit yang terjadi. Prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja, sehingga defisit anggaran diupayakan untuk diminimalkan. Jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. Dalam rangka menutup defisit anggaran, daerah dapat melakukan pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan Bank, lembaga keuangan bukan Bank dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komponen pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan Pembiayaan Daerah dapat berasal dari penerimaan pinjaman daerah dan SiLPA. SiLPA adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang diprediksikan dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan, kegiatan lanjutan. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) setiap tahunnya diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disebut pembiayaan netto, selanjutnya selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto disebut SiLPA (dengan I Kapital). SiLPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, pada Perubahan APBD Tahun 2024 hasil audit 2023 sebesar **Rp. 539.432.175.932,66 (Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah Koma Enam**

Puluh Enam Sen) mengalami penurunan sebesar **Rp. 258.504.948.462,34** **(Dua Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah Koma Tiga Puluh Empat Sen)** dimana sebelumnya dianggarkan sebesar **Rp. 797.937.124.395,-** **(Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).** Pada Perubahan APBD Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Malinau menganggarkan pengeluaran pembiayaan sebesar **Rp. 121.610.000.000,-** **(Seratus Dua Puluh Satu Miliar Enam Ratus Sepuluh Juta Rupiah).**

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2024 ini disusun dengan berpedoman pada Perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2024 yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Malinau. Selanjutnya Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (Perubahan RKA) Perangkat Daerah, yang merupakan bahan penyusunan Perubahan RAPBD Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2024.

Demikian Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 disepakati sebagai dasar penyusunan Perubahan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) Tahun Anggaran 2024.

Malinau, 14 Agustus 2024

BUPATI MALINAU,



Wempi W.Mawa, S.E., M.H

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN					
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	305.941.087.179,00	487.690.332.171,00	181.749.244.992,00	
1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	305.941.087.179,00	487.690.332.171,00	181.749.244.992,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	46.333.081.799,00	166.044.370.720,00	119.711.288.921,00	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	21.023.311.850,00	86.187.783.606,00	65.164.471.756,00	
1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	2.000.000.000,00	6.394.352.415,00	4.394.352.415,00	
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	300.000.000,00	2.431.189.000,00	2.131.189.000,00	
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.500.000.000,00	5.782.300.150,00	4.282.300.150,00	
1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	250.000.000,00	1.818.568.500,00	1.568.568.500,00	
1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0,00	457.394.000,00	457.394.000,00	
1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	500.000.000,00	496.330.000,00	-3.670.000,00	
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	500.000.000,00	1.761.000.000,00	1.261.000.000,00	
1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0,00	819.899.500,00	819.899.500,00	
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	300.000.000,00	2.066.370.300,00	1.766.370.300,00	
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	324.997.000,00	767.154.900,00	442.157.900,00	
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	250.000.000,00	1.375.491.600,00	1.125.491.600,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	12.000.000.000,00	21.076.529.941,00	9.076.529.941,00	
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	150.000.000,00	171.720.000,00	21.720.000,00	
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0,00	7.598.143.500,00	7.598.143.500,00	
1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	0,00	148.300.000,00	148.300.000,00	
1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	0,00	1.367.915.900,00	1.367.915.900,00	
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	250.000.000,00	300.000.000,00	50.000.000,00	
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	300.000.000,00	285.899.000,00	-14.101.000,00	
1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	0,00	735.503.900,00	735.503.900,00	
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.464.795.000,00	21.531.406.200,00	20.066.611.200,00	
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	0,00	2.961.605.400,00	2.961.605.400,00	
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	0,00	943.596.000,00	943.596.000,00	
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	450.000.000,00	390.424.100,00	-59.575.900,00	
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	483.519.850,00	4.506.689.300,00	4.023.169.450,00	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	14.601.181.329,00	47.403.529.224,00	32.802.347.895,00	
1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.672.635.050,00	1.739.180.000,00	66.544.950,00	
1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	0,00	564.448.300,00	564.448.300,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	0,00	564.606.000,00	564.606.000,00	
1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	482.005.050,00	1.017.555.200,00	535.550.150,00	
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	496.850.150,00	3.292.669.445,00	2.795.819.295,00	
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	277.383.100,00	990.930.000,00	713.546.900,00	
1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	200.000.000,00	979.068.000,00	779.068.000,00	
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	1.009.288.500,00	1.009.288.500,00	
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	500.000.000,00	887.324.000,00	387.324.000,00	
1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0,00	446.900.000,00	446.900.000,00	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	200.000.000,00	2.198.923.000,00	1.998.923.000,00	
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	250.000.000,00	984.401.300,00	734.401.300,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	8.230.486.979,00	14.799.183.179,00	6.568.696.200,00	
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	
1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0,00	1.071.423.500,00	1.071.423.500,00	
1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	0,00	1.085.652.400,00	1.085.652.400,00	
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	191.821.000,00	250.000.000,00	58.179.000,00	
1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	200.000.000,00	191.460.000,00	-8.540.000,00	
1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	300.000.000,00	293.262.300,00	-6.737.700,00	
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	0,00	3.096.091.000,00	3.096.091.000,00	
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	0,00	728.225.300,00	728.225.300,00	
1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	0,00	589.872.100,00	589.872.100,00	
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.000.000.000,00	9.935.775.700,00	8.935.775.700,00	
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	500.000.000,00	487.290.000,00	-12.710.000,00	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	8.235.168.620,00	22.274.299.920,00	14.039.131.300,00	
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	200.000.000,00	1.106.421.400,00	906.421.400,00	
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	0,00	270.895.500,00	270.895.500,00	
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	0,00	571.143.960,00	571.143.960,00	
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	14.986.000,00	1.135.960.660,00	1.120.974.660,00	
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	300.000.000,00	245.999.950,00	-54.000.050,00	
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	499.999.700,00	768.421.400,00	268.421.700,00	
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.125.000.000,00	1.184.001.150,00	59.001.150,00	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.518.900.000,00	5.570.710.800,00	2.051.810.800,00	
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	100.000.000,00	119.182.600,00	19.182.600,00	
1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	0,00	525.289.700,00	525.289.700,00	
1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0,00	617.155.960,00	617.155.960,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	0,00	1.220.441.600,00	1.220.441.600,00	
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	0,00	473.925.300,00	473.925.300,00	
1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.476.282.920,00	3.032.936.940,00	1.556.654.020,00	
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.000.000.000,00	5.431.813.000,00	4.431.813.000,00	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.473.420.000,00	10.178.757.970,00	7.705.337.970,00	
1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	594.060.000,00	599.999.950,00	5.939.950,00	
1.01.02.2.04.0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	80.000.000,00	126.880.000,00	46.880.000,00	
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	150.000.000,00	134.800.000,00	-15.200.000,00	
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.214.360.000,00	3.935.868.000,00	2.721.508.000,00	
1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	85.000.000,00	120.000.000,00	35.000.000,00	
1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	0,00	235.000.000,00	235.000.000,00	
1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	0,00	1.377.449.420,00	1.377.449.420,00	
1.01.02.2.04.0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	0,00	2.998.129.600,00	2.998.129.600,00	
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah	200.000.000,00	299.865.000,00	99.865.000,00	
1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	100.766.000,00	100.766.000,00	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	0,00	2.091.867.300,00	2.091.867.300,00	
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	0,00	1.620.122.300,00	1.620.122.300,00	
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	0,00	716.294.900,00	716.294.900,00	
1.01.03.2.01.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	0,00	903.827.400,00	903.827.400,00	
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	0,00	471.745.000,00	471.745.000,00	
1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	0,00	471.745.000,00	471.745.000,00	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	2.297.392.400,00	15.626.424.283,00	13.329.031.883,00	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.297.392.400,00	15.626.424.283,00	13.329.031.883,00	
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.044.802.500,00	11.980.951.200,00	10.936.148.700,00	
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.252.589.900,00	3.645.473.083,00	2.392.883.183,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	257.310.612.980,00	303.927.669.868,00	46.617.056.888,00	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	650.000.000,00	617.623.600,00	-32.376.400,00	
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000,00	88.371.300,00	-11.628.700,00	
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	200.000.000,00	179.252.300,00	-20.747.700,00	
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	252.165.792.980,00	297.959.406.316,00	45.793.613.336,00	
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	251.915.792.980,00	297.658.206.316,00	45.742.413.336,00	
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	250.000.000,00	301.200.000,00	51.200.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00	
1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	520.000.000,00	518.335.000,00	-1.665.000,00	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.000.000,00	498.335.000,00	-1.665.000,00	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.450.000.000,00	4.051.097.924,00	601.097.924,00	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	300.000.000,00	308.200.424,00	8.200.424,00	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.150.000.000,00	3.742.897.500,00	592.897.500,00	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	524.820.000,00	611.207.028,00	86.387.028,00	
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000,00	76.297.000,00	-23.703.000,00	
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	389.820.000,00	499.910.028,00	110.090.028,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	213.730.357.537,00	391.627.459.397,00	177.897.101.860,00	
1.02.2.14.0.00.03.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	129.000.803.249,00	237.305.615.579,00	108.304.812.330,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	35.806.064.546,00	90.498.215.463,00	54.692.150.917,00	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	21.600.000.000,00	71.243.569.744,00	49.643.569.744,00	
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	8.000.000.000,00	32.645.816.548,00	24.645.816.548,00	
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.000.000.000,00	2.630.444.600,00	1.630.444.600,00	
1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	1.000.000.000,00	7.108.403.350,00	6.108.403.350,00	
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.300.000.000,00	1.698.617.100,00	398.617.100,00	
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1.000.000.000,00	2.169.484.500,00	1.169.484.500,00	
1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	300.000.000,00	289.249.450,00	-10.750.550,00	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.000.000.000,00	20.815.577.496,00	15.815.577.496,00	
1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	300.000.000,00	362.076.000,00	62.076.000,00	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3.100.000.000,00	2.923.900.700,00	-176.099.300,00	
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.906.064.546,00	18.753.278.699,00	4.847.214.153,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	235.000.000,00	100.000.000,00	-135.000.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	150.000.000,00	100.000.000,00	-50.000.000,00	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100.000.000,00	126.000.000,00	26.000.000,00	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	150.000.000,00	100.000.000,00	-50.000.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	150.000.000,00	100.000.000,00	-50.000.000,00	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	106.520.000,00	100.000.000,00	-6.520.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100.000.000,00	426.683.720,00	326.683.720,00	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	100.000.000,00	1.250.000.000,00	1.150.000.000,00	
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	250.000.000,00	288.109.400,00	38.109.400,00	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	300.000.000,00	497.741.000,00	197.741.000,00	
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100.000.000,00	486.496.279,00	386.496.279,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	124.152.546,00	288.943.600,00	164.791.054,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	250.000.000,00	737.869.400,00	487.869.400,00	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	10.290.392.000,00	11.961.945.800,00	1.671.553.800,00	
1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0,00	14.700.000,00	14.700.000,00	
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100.000.000,00	115.792.000,00	15.792.000,00	
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	0,00	619.220.900,00	619.220.900,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	58.618.800,00	58.618.800,00	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	12.100.000,00	12.100.000,00	
1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	319.057.800,00	319.057.800,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	300.000.000,00	501.367.020,00	201.367.020,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	300.000.000,00	501.367.020,00	201.367.020,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	16.550.000.000,00	2.412.322.350,00	-14.137.677.650,00	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	16.050.000.000,00	798.864.200,00	-15.251.135.800,00	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	15.850.000.000,00	599.033.800,00	-15.250.966.200,00	
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	200.000.000,00	199.830.400,00	-169.600,00	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000,00	1.613.458.150,00	1.113.458.150,00	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000,00	1.613.458.150,00	1.113.458.150,00	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	300.000.000,00	250.401.000,00	-49.599.000,00	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	0,00	85.387.000,00	85.387.000,00	
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	0,00	85.387.000,00	85.387.000,00	
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	300.000.000,00	165.014.000,00	-134.986.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	300.000.000,00	165.014.000,00	-134.986.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	571.520.000,00	93.404.000,00	-478.116.000,00	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	73.304.000,00	-26.696.000,00	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	100.000.000,00	73.304.000,00	-26.696.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	221.520.000,00	20.100.000,00	-201.420.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	221.520.000,00	20.100.000,00	-201.420.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	75.773.218.703,00	144.051.272.766,00	68.278.054.063,00	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	72.291.275.703,00	141.831.616.066,00	69.540.340.363,00	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	72.291.275.703,00	141.831.616.066,00	69.540.340.363,00	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.208.273.000,00	1.282.336.700,00	-925.936.300,00	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.005.273.000,00	196.798.830,00	-808.474.170,00	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	350.000.000,00	404.196.346,00	54.196.346,00	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	253.000.000,00	88.990.324,00	-164.009.676,00	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.000.000,00	592.351.200,00	-7.648.800,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	627.670.000,00	489.280.000,00	-138.390.000,00	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	489.280.000,00	489.280.000,00	0,00	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	646.000.000,00	448.040.000,00	-197.960.000,00	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	356.000.000,00	158.040.000,00	-197.960.000,00	
1.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	290.000.000,00	290.000.000,00	0,00	
1.02.2.14.0.00.03.0002	RS Pratama Langap	500.000.000,00	757.583.204,00	257.583.204,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	500.000.000,00	757.583.204,00	257.583.204,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000,00	757.583.204,00	257.583.204,00	
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	500.000.000,00	757.583.204,00	257.583.204,00	
1.02.2.14.0.00.03.0003	RS Pratama Long Ampung	800.000.000,00	853.943.420,00	53.943.420,00	
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	800.000.000,00	853.943.420,00	53.943.420,00	
1.02.2.14.0.00.03.0004	Puskesmas Malinau Kota	50.000.000,00	3.376.626.212,00	3.326.626.212,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	27.114.000,00	27.114.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	9.450.000,00	9.450.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	394.753.000,00	394.753.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	52.200.000,00	52.200.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	38.670.000,00	38.670.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	212.700.000,00	212.700.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	50.000.000,00	2.187.694.212,00	2.137.694.212,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	600.000,00	600.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	94.800.000,00	94.800.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	54.360.000,00	54.360.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	254.850.000,00	254.850.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	17.935.000,00	17.935.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	17.935.000,00	17.935.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	17.935.000,00	17.935.000,00	
1.02.2.14.0.00.03.0005	Puskesmas Malinau Seberang	50.000.000,00	2.333.601.996,00	2.283.601.996,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	50.000.000,00	2.304.299.996,00	2.254.299.996,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	2.304.299.996,00	2.254.299.996,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	62.670.000,00	62.670.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	34.800.000,00	34.800.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	40.500.000,00	40.500.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	306.802.000,00	306.802.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	84.150.000,00	84.150.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	173.100.000,00	173.100.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	50.000.000,00	1.304.623.996,00	1.254.623.996,00	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	40.694.000,00	40.694.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	34.480.000,00	34.480.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	152.280.000,00	152.280.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	29.302.000,00	29.302.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	29.302.000,00	29.302.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	29.302.000,00	29.302.000,00	
1.02.2.14.0.00.03.0006	Puskesmas Malinau Barat	50.000.000,00	1.615.426.588,00	1.565.426.588,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	50.000.000,00	1.613.426.588,00	1.563.426.588,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	1.613.426.588,00	1.563.426.588,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	24.716.000,00	24.716.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	55.800.000,00	55.800.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	17.100.000,00	17.100.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	249.773.000,00	249.773.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	39.600.000,00	39.600.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	40.432.000,00	40.432.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	95.850.000,00	95.850.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	50.000.000,00	888.485.588,00	838.485.588,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	56.400.000,00	56.400.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	16.566.000,00	16.566.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	108.904.000,00	108.904.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
1.02.2.14.0.00.03.0007	Puskesmas Pulau Sapi	100.000.000,00	1.538.712.028,00	1.438.712.028,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100.000.000,00	1.528.512.028,00	1.428.512.028,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	1.528.512.028,00	1.428.512.028,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	23.220.000,00	23.220.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	32.400.000,00	32.400.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	284.642.000,00	284.642.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	47.400.000,00	47.400.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	75.342.000,00	75.342.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	125.100.000,00	125.100.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	100.000.000,00	696.280.028,00	596.280.028,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	600.000,00	600.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	19.080.000,00	19.080.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	145.548.000,00	145.548.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	
1.02.2.14.0.00.03.0008	Puskesmas Setulang	50.000.000,00	1.016.525.424,00	966.525.424,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	50.000.000,00	934.925.424,00	884.925.424,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	934.925.424,00	884.925.424,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	56.480.000,00	56.480.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	36.600.000,00	36.600.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	221.446.000,00	221.446.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	17.100.000,00	17.100.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	48.500.000,00	48.500.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	89.800.000,00	89.800.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	50.000.000,00	340.459.424,00	290.459.424,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	900.000,00	900.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	300.000,00	300.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	42.060.000,00	42.060.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	55.480.000,00	55.480.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	81.600.000,00	81.600.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	81.600.000,00	81.600.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	81.600.000,00	81.600.000,00	
1.02.2.14.0.00.03.0009	Puskesmas Sehati	50.000.000,00	1.010.731.928,00	960.731.928,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	50.000.000,00	987.131.928,00	937.131.928,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	987.131.928,00	937.131.928,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	8.930.000,00	8.930.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	243.110.000,00	243.110.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	8.700.000,00	8.700.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	34.012.000,00	34.012.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	161.500.000,00	161.500.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	50.000.000,00	328.158.928,00	278.158.928,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	46.560.000,00	46.560.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	105.461.000,00	105.461.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	23.600.000,00	23.600.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	23.600.000,00	23.600.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	23.600.000,00	23.600.000,00	
1.02.2.14.0.00.03.0010	Puskesmas Loreh	50.000.000,00	1.362.219.288,00	1.312.219.288,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	50.000.000,00	1.337.419.288,00	1.287.419.288,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	1.337.419.288,00	1.287.419.288,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	19.270.000,00	19.270.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	252.535.000,00	252.535.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	59.002.000,00	59.002.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	147.600.000,00	147.600.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	50.000.000,00	635.652.288,00	585.652.288,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	20.700.000,00	20.700.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	49.160.000,00	49.160.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	24.800.000,00	24.800.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	24.800.000,00	24.800.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	24.800.000,00	24.800.000,00	
1.02.2.14.0.00.03.0011	Puskesmas Long Alango	50.000.000,00	1.091.167.896,00	1.041.167.896,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	50.000.000,00	1.073.067.896,00	1.023.067.896,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	1.073.067.896,00	1.023.067.896,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	27.680.000,00	27.680.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	24.080.000,00	24.080.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	261.250.000,00	261.250.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	48.160.000,00	48.160.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	23.305.000,00	23.305.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	156.740.000,00	156.740.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	50.000.000,00	351.081.896,00	301.081.896,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	750.000,00	750.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	14.740.000,00	14.740.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	300.000,00	300.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	37.461.000,00	37.461.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	116.320.000,00	116.320.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	18.100.000,00	18.100.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	18.100.000,00	18.100.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	18.100.000,00	18.100.000,00	
1.02.2.14.0.00.03.0012	Puskesmas Pujungan	50.000.000,00	1.348.762.724,00	1.298.762.724,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	50.000.000,00	1.324.582.724,00	1.274.582.724,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	1.324.582.724,00	1.274.582.724,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	22.384.000,00	22.384.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	38.440.000,00	38.440.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	181.042.000,00	181.042.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	22.680.000,00	22.680.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	32.630.000,00	32.630.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	260.130.000,00	260.130.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	50.000.000,00	465.635.724,00	415.635.724,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	300.000,00	300.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	46.410.000,00	46.410.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	69.840.000,00	69.840.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	185.091.000,00	185.091.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	24.180.000,00	24.180.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	24.180.000,00	24.180.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	24.180.000,00	24.180.000,00	
1.02.2.14.0.00.03.0013	Puskesmas Long Ampung	50.000.000,00	1.107.752.400,00	1.057.752.400,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	50.000.000,00	1.067.432.400,00	1.017.432.400,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	1.067.432.400,00	1.017.432.400,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	23.505.000,00	23.505.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	51.140.000,00	51.140.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	7.580.000,00	7.580.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	228.398.000,00	228.398.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	17.550.000,00	17.550.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	48.990.000,00	48.990.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	162.870.000,00	162.870.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	50.000.000,00	363.869.400,00	313.869.400,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	600.000,00	600.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	16.660.000,00	16.660.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	7.580.000,00	7.580.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	32.250.000,00	32.250.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	106.440.000,00	106.440.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	40.320.000,00	40.320.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	40.320.000,00	40.320.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	40.320.000,00	40.320.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.2.14.0.00.03.0014	Puskesmas Long Nawang	50.000.000,00	1.267.531.196,00	1.217.531.196,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	50.000.000,00	1.194.531.196,00	1.144.531.196,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	1.194.531.196,00	1.144.531.196,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	23.800.000,00	23.800.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	24.600.000,00	24.600.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	269.429.000,00	269.429.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	37.318.000,00	37.318.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	150.150.000,00	150.150.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	50.000.000,00	448.169.196,00	398.169.196,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	900.000,00	900.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	26.700.000,00	26.700.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	157.965.000,00	157.965.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	73.000.000,00	73.000.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	73.000.000,00	73.000.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	73.000.000,00	73.000.000,00	
1.02.2.14.0.00.03.0016	Puskesmas Sungai Boh	50.000.000,00	1.129.388.516,00	1.079.388.516,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	50.000.000,00	1.113.388.516,00	1.063.388.516,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	1.113.388.516,00	1.063.388.516,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	9.176.000,00	9.176.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	225.320.000,00	225.320.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	37.580.000,00	37.580.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	151.420.000,00	151.420.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	50.000.000,00	427.892.516,00	377.892.516,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	17.800.000,00	17.800.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	167.700.000,00	167.700.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	
1.02.2.14.0.00.03.0017	Puskesmas Data Dian	50.000.000,00	837.449.164,00	787.449.164,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	50.000.000,00	818.249.164,00	768.249.164,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	818.249.164,00	768.249.164,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	12.400.000,00	12.400.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	32.850.000,00	32.850.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	187.743.000,00	187.743.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	31.050.000,00	31.050.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	29.492.000,00	29.492.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	110.900.000,00	110.900.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	50.000.000,00	286.104.164,00	236.104.164,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	8.550.000,00	8.550.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	104.310.000,00	104.310.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	
1.02.2.14.0.00.03.0018	Puskesmas Long Sule	50.000.000,00	723.621.000,00	673.621.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	50.000.000,00	712.821.000,00	662.821.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	712.821.000,00	662.821.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	5.124.000,00	5.124.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	143.959.000,00	143.959.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	26.400.000,00	26.400.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	22.056.000,00	22.056.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	63.300.000,00	63.300.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	50.000.000,00	227.420.000,00	177.420.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	39.600.000,00	39.600.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	4.824.000,00	4.824.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	157.338.000,00	157.338.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	
1.02.2.14.0.00.03.0019	Puskesmas Long Berang	50.000.000,00	1.139.325.256,00	1.089.325.256,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	50.000.000,00	1.139.325.256,00	1.089.325.256,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	1.139.325.256,00	1.089.325.256,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	66.760.000,00	66.760.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	281.910.000,00	281.910.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	30.060.000,00	30.060.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	102.874.000,00	102.874.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	253.200.000,00	253.200.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	50.000.000,00	305.741.256,00	255.741.256,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	6.620.000,00	6.620.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	300.000,00	300.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	83.860.000,00	83.860.000,00	
1.02.2.14.0.00.03.0020	Puskesmas Sesua	50.000.000,00	922.800.760,00	872.800.760,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	7.908.000,00	7.908.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	189.618.000,00	189.618.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	21.900.000,00	21.900.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	21.356.000,00	21.356.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	103.500.000,00	103.500.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	50.000.000,00	357.870.760,00	307.870.760,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	900.000,00	900.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	147.768.000,00	147.768.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	58.800.000,00	58.800.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	58.800.000,00	58.800.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	58.800.000,00	58.800.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.2.14.0.00.03.0021	Puskesmas Metut	50.000.000,00	856.843.000,00	806.843.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	50.000.000,00	846.443.000,00	796.443.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	846.443.000,00	796.443.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	2.944.000,00	2.944.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	21.820.000,00	21.820.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	20.300.000,00	20.300.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	150.870.000,00	150.870.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	19.700.000,00	19.700.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	45.199.000,00	45.199.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	123.700.000,00	123.700.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	50.000.000,00	290.690.000,00	240.690.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	450.000,00	450.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	39.250.000,00	39.250.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	40.040.000,00	40.040.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	90.280.000,00	90.280.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	10.400.000,00	10.400.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	10.400.000,00	10.400.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	10.400.000,00	10.400.000,00	
1.02.2.14.0.00.03.0023	RSUD MALINAU	82.529.554.288,00	130.031.831.818,00	47.502.277.530,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.195.000.000,00	61.909.917.500,00	58.714.917.500,00	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.000.000.000,00	60.714.917.500,00	57.714.917.500,00	
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	11.907.689.284,00	11.907.689.284,00	
1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	0,00	2.548.593.513,00	2.548.593.513,00	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.000.000.000,00	30.258.634.703,00	27.258.634.703,00	
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	0,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	195.000.000,00	1.195.000.000,00	1.000.000.000,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	195.000.000,00	1.195.000.000,00	1.000.000.000,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	5.000.000.000,00	10.385.525.400,00	5.385.525.400,00	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	5.000.000.000,00	5.133.200.000,00	133.200.000,00	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	5.000.000.000,00	5.133.200.000,00	133.200.000,00	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	5.252.325.400,00	5.252.325.400,00	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	5.252.325.400,00	5.252.325.400,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	74.334.554.288,00	57.736.388.918,00	-16.598.165.370,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33.411.964.288,00	10.707.496.365,00	-22.704.467.923,00	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33.411.964.288,00	10.707.496.365,00	-22.704.467.923,00	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	922.590.000,00	2.733.816.000,00	1.811.226.000,00	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	922.590.000,00	2.733.816.000,00	1.811.226.000,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	40.000.000.000,00	44.295.076.553,00	4.295.076.553,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	40.000.000.000,00	44.295.076.553,00	4.295.076.553,00	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	118.254.447.392,00	753.993.533.175,00	635.739.085.783,00	
1.03.1.04.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	118.254.447.392,00	753.993.533.175,00	635.739.085.783,00	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	7.680.565.694,00	86.192.928.814,00	78.512.363.120,00	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.980.565.694,00	72.545.192.684,00	67.564.626.990,00	
1.03.02.2.01.0081	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	150.565.694,00	499.986.315,00	349.420.621,00	
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	2.080.000.000,00	25.196.286.797,00	23.116.286.797,00	
1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai	2.400.000.000,00	46.398.919.572,00	43.998.919.572,00	
1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	350.000.000,00	450.000.000,00	100.000.000,00	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.700.000.000,00	13.647.736.130,00	10.947.736.130,00	
1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	2.000.000.000,00	10.203.055.208,00	8.203.055.208,00	
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	600.000.000,00	2.368.448.922,00	1.768.448.922,00	
1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	100.000.000,00	1.076.232.000,00	976.232.000,00	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.499.999.102,00	11.157.411.200,00	8.657.412.098,00	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2.499.999.102,00	11.157.411.200,00	8.657.412.098,00	
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.499.999.102,00	11.157.411.200,00	8.657.412.098,00	
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	499.998.400,00	499.998.400,00	0,00	
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	499.998.400,00	499.998.400,00	0,00	
1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	499.998.400,00	499.998.400,00	0,00	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.649.999.800,00	2.147.987.600,00	-4.502.012.200,00	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.649.999.800,00	2.147.987.600,00	-4.502.012.200,00	
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	1.499.999.800,00	1.499.999.800,00	0,00	
1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	150.000.000,00	647.987.800,00	497.987.800,00	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	180.000.000,00	996.332.500,00	816.332.500,00	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	180.000.000,00	996.332.500,00	816.332.500,00	
1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	180.000.000,00	996.332.500,00	816.332.500,00	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	9.349.874.875,00	133.029.680.750,00	123.679.805.875,00	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	9.349.874.875,00	133.029.680.750,00	123.679.805.875,00	
1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6.250.000.000,00	30.266.900.000,00	24.016.900.000,00	
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2.749.874.875,00	102.416.006.750,00	99.666.131.875,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	350.000.000,00	346.774.000,00	-3.226.000,00	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.410.046.120,00	41.586.952.841,00	40.176.906.721,00	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1.410.046.120,00	41.586.952.841,00	40.176.906.721,00	
1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1.410.046.120,00	41.586.952.841,00	40.176.906.721,00	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	42.350.000.000,00	366.309.060.457,00	323.959.060.457,00	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	42.350.000.000,00	366.309.060.457,00	323.959.060.457,00	
1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan	0,00	17.999.733.000,00	17.999.733.000,00	
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	0,00	16.411.166.400,00	16.411.166.400,00	
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	22.000.000.000,00	256.806.706.057,00	234.806.706.057,00	
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	1.000.000.000,00	1.950.000.000,00	950.000.000,00	
1.03.10.2.01.0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	200.000.000,00	299.581.000,00	99.581.000,00	
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	0,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	14.000.000.000,00	59.342.141.000,00	45.342.141.000,00	
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	500.000.000,00	499.733.000,00	-267.000,00	
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	2.000.000.000,00	5.000.000.000,00	3.000.000.000,00	
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.574.959.000,00	3.943.355.000,00	1.368.396.000,00	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	624.997.000,00	1.753.684.000,00	1.128.687.000,00	
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	350.000.000,00	314.300.000,00	-35.700.000,00	
1.03.12.2.01.0008	Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota	49.998.000,00	246.709.000,00	196.711.000,00	
1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	0,00	976.356.000,00	976.356.000,00	
1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	150.000.000,00	146.370.000,00	-3.630.000,00	
1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	74.999.000,00	69.949.000,00	-5.050.000,00	
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	624.994.000,00	889.683.000,00	264.689.000,00	
1.03.12.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	199.999.000,00	535.288.000,00	335.289.000,00	
1.03.12.2.02.0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	424.995.000,00	354.395.000,00	-70.600.000,00	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.074.979.000,00	1.049.999.000,00	-24.980.000,00	
1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	374.999.000,00	362.899.000,00	-12.100.000,00	
1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	699.980.000,00	687.100.000,00	-12.880.000,00	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	249.989.000,00	249.989.000,00	0,00	
1.03.12.2.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	49.999.000,00	49.999.000,00	0,00	
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	99.990.000,00	99.990.000,00	0,00	
1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	45.059.004.401,00	108.129.825.613,00	63.070.821.212,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.934.810.413,00	12.472.752.178,00	1.537.941.765,00	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.934.810.413,00	12.472.752.178,00	1.537.941.765,00	
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	842.849.873,00	1.875.835.774,00	1.032.985.901,00	
1.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	617.013.373,00	1.649.999.274,00	1.032.985.901,00	
1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	225.836.500,00	225.836.500,00	0,00	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	632.104.000,00	632.104.000,00	0,00	
1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	499.933.000,00	499.933.000,00	0,00	
1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	132.171.000,00	132.171.000,00	0,00	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.872.946.500,00	15.106.191.168,00	6.233.244.668,00	
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	78.698.000,00	78.698.000,00	0,00	
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	572.913.500,00	390.408.500,00	-182.505.000,00	
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	390.001.000,00	1.439.387.000,00	1.049.386.000,00	
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	182.300.000,00	182.300.000,00	0,00	
1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	6.098.298.100,00	10.964.711.768,00	4.866.413.668,00	
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.550.735.900,00	2.050.685.900,00	499.950.000,00	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.323.075.093,00	73.957.188.093,00	65.634.113.000,00	
1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	11.432.225.900,00	11.432.225.900,00	
1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	4.099.931.820,00	48.659.675.040,00	44.559.743.220,00	
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	299.846.000,00	293.846.000,00	-6.000.000,00	
1.03.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	3.923.297.273,00	13.571.441.153,00	9.648.143.880,00	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.906.178.522,00	4.085.754.400,00	1.179.575.878,00	
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.884.000,00	81.360.000,00	21.476.000,00	
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	499.690.000,00	1.137.420.000,00	637.730.000,00	
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	1.999.849.522,00	2.798.594.400,00	798.744.878,00	
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.380.000,00	68.380.000,00	0,00	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.149.977.000,00	30.683.965.303,00	26.533.988.303,00	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
1.04.02.2.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.399.977.000,00	3.371.777.000,00	1.971.800.000,00	
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	499.977.000,00	499.977.000,00	0,00	
1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	499.977.000,00	499.977.000,00	0,00	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	900.000.000,00	2.871.800.000,00	1.971.800.000,00	
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	900.000.000,00	2.871.800.000,00	1.971.800.000,00	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.400.000.000,00	26.962.188.303,00	24.562.188.303,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	2.400.000.000,00	26.962.188.303,00	24.562.188.303,00	
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	2.400.000.000,00	26.962.188.303,00	24.562.188.303,00	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	57.746.908.302,00	41.302.117.081,00	-16.444.791.221,00	
1.05.0.00.0.00.03.0000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	41.243.000.000,00	24.764.396.379,00	-16.478.603.621,00	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.298.552.287,00	3.848.461.324,00	2.549.909.037,00	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.144.419.990,00	3.768.506.450,00	2.624.086.460,00	
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	234.913.740,00	385.471.000,00	150.557.260,00	
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	436.829.400,00	438.780.000,00	1.950.600,00	
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	299.749.950,00	2.794.319.450,00	2.494.569.500,00	
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	172.926.900,00	149.936.000,00	-22.990.900,00	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	79.397.717,00	79.954.874,00	557.157,00	
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	50.081.174,00	49.984.874,00	-96.300,00	
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	29.316.543,00	29.970.000,00	653.457,00	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	181.763.055,00	480.168.300,00	298.405.245,00	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	181.763.055,00	204.368.300,00	22.605.245,00	
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	181.763.055,00	204.368.300,00	22.605.245,00	
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	0,00	275.800.000,00	275.800.000,00	
1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	0,00	275.800.000,00	275.800.000,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.762.684.658,00	20.435.766.755,00	-19.326.917.903,00	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.109.365.331,00	17.620.981.805,00	2.511.616.474,00	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.109.365.331,00	17.620.981.805,00	2.511.616.474,00	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	1.049.072.000,00	1.049.072.000,00	
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	1.014.300.000,00	1.014.300.000,00	
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	34.772.000,00	34.772.000,00	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	514.249.458,00	831.290.300,00	317.040.842,00	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.405.800,00	69.991.000,00	53.585.200,00	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	279.775.500,00	349.146.000,00	69.370.500,00	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.999.728,00	49.999.300,00	-428,00	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	168.068.430,00	362.154.000,00	194.085.570,00	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.239.075.446,00	99.908.395,00	-23.139.167.051,00	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.075.446,00	99.908.395,00	65.832.949,00	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	899.994.423,00	834.514.255,00	-65.480.168,00	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	899.994.423,00	834.514.255,00	-65.480.168,00	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.503.908.302,00	16.537.720.702,00	33.812.400,00	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.542.567.774,00	2.747.505.296,00	204.937.522,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	917.964.000,00	1.038.648.500,00	120.684.500,00	
1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	681.610.000,00	800.000.000,00	118.390.000,00	
1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	236.354.000,00	238.648.500,00	2.294.500,00	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.124.776.374,00	1.209.146.374,00	84.370.000,00	
1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	558.375.000,00	558.375.000,00	0,00	
1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	199.972.500,00	200.000.000,00	27.500,00	
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	0,00	92.812.500,00	92.812.500,00	
1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	249.038.874,00	242.988.874,00	-6.050.000,00	
1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	117.390.000,00	114.970.000,00	-2.420.000,00	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	499.827.400,00	499.710.422,00	-116.978,00	
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	149.984.000,00	149.992.422,00	8.422,00	
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	199.948.800,00	199.933.600,00	-15.200,00	
1.05.03.2.03.0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	149.894.600,00	149.784.400,00	-110.200,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.961.340.528,00	13.790.215.406,00	-171.125.122,00	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.276.066.078,00	5.163.844.556,00	-112.221.522,00	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.276.066.078,00	5.163.844.556,00	-112.221.522,00	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	349.468.000,00	290.565.400,00	-58.902.600,00	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.478.000,00	40.575.400,00	-58.902.600,00	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.990.000,00	249.990.000,00	0,00	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.034.199.450,00	8.034.199.450,00	0,00	
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.034.199.450,00	8.034.199.450,00	0,00	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249.607.000,00	249.606.000,00	-1.000,00	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	249.607.000,00	249.606.000,00	-1.000,00	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	914.607.680,00	1.371.834.500,00	457.226.820,00	
2.08.1.06.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	914.607.680,00	1.371.834.500,00	457.226.820,00	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	457.113.800,00	652.000.000,00	194.886.200,00	
1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	99.999.800,00	100.000.000,00	200,00	
1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	99.999.800,00	100.000.000,00	200,00	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	357.114.000,00	552.000.000,00	194.886.000,00	
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	177.123.000,00	372.000.000,00	194.877.000,00	
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	179.991.000,00	180.000.000,00	9.000,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	57.499.880,00	229.834.500,00	172.334.620,00	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	57.499.880,00	114.986.500,00	57.486.620,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	57.499.880,00	57.500.000,00	120,00	
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	0,00	57.486.500,00	57.486.500,00	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	0,00	114.848.000,00	114.848.000,00	
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	0,00	57.348.000,00	57.348.000,00	
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	0,00	57.500.000,00	57.500.000,00	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	399.994.000,00	400.000.000,00	6.000,00	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	399.994.000,00	400.000.000,00	6.000,00	
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	399.994.000,00	400.000.000,00	6.000,00	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	
1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	8.783.949.610,00	13.874.513.262,00	5.090.563.652,00	
2.07.0.00.0.00.02.0000	Dinas Ketenagakerjaan	8.783.949.610,00	13.874.513.262,00	5.090.563.652,00	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	300.000.000,00	244.612.500,00	-55.387.500,00	
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	300.000.000,00	244.612.500,00	-55.387.500,00	
2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	300.000.000,00	244.612.500,00	-55.387.500,00	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.583.665.400,00	7.565.033.115,00	4.981.367.715,00	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.476.350.400,00	7.450.034.115,00	4.973.683.715,00	
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2.476.350.400,00	7.450.034.115,00	4.973.683.715,00	
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	39.980.000,00	39.999.000,00	19.000,00	
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	39.980.000,00	39.999.000,00	19.000,00	
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	42.415.000,00	50.000.000,00	7.585.000,00	
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	42.415.000,00	50.000.000,00	7.585.000,00	
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.920.000,00	25.000.000,00	80.000,00	
2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	24.920.000,00	25.000.000,00	80.000,00	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	553.777.000,00	925.000.000,00	371.223.000,00	
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	180.414.000,00	375.000.000,00	194.586.000,00	
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	86.374.000,00	100.000.000,00	13.626.000,00	
2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	52.370.000,00	75.000.000,00	22.630.000,00	
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	41.670.000,00	200.000.000,00	158.330.000,00	
2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	34.070.000,00	50.000.000,00	15.930.000,00	
2.07.04.2.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	34.070.000,00	50.000.000,00	15.930.000,00	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	246.195.000,00	300.000.000,00	53.805.000,00	
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	96.195.000,00	100.000.000,00	3.805.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	93.098.000,00	200.000.000,00	106.902.000,00	
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	93.098.000,00	200.000.000,00	106.902.000,00	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	131.428.600,00	550.220.735,00	418.792.135,00	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	53.518.600,00	250.220.735,00	196.702.135,00	
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	51.438.600,00	100.000.000,00	48.561.400,00	
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	2.080.000,00	150.220.735,00	148.140.735,00	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	77.910.000,00	300.000.000,00	222.090.000,00	
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	77.910.000,00	200.000.000,00	122.090.000,00	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.215.078.610,00	4.589.646.912,00	-625.431.698,00	
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.189.702.610,00	3.761.728.912,00	-427.973.698,00	
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.189.702.610,00	3.761.728.912,00	-427.973.698,00	
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	830.556.000,00	744.358.000,00	-86.198.000,00	
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	265.604.000,00	107.470.000,00	-158.134.000,00	
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	449.952.000,00	536.888.000,00	86.936.000,00	
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.000.000,00	83.560.000,00	-11.440.000,00	
2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	38.560.000,00	-11.440.000,00	
2.07.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.650.635.518,00	9.174.140.478,00	2.523.504.960,00	
2.08.1.06.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	6.650.635.518,00	9.174.140.478,00	2.523.504.960,00	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	99.992.000,00	100.000.000,00	8.000,00	
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	69.992.000,00	70.000.000,00	8.000,00	
2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	29.992.000,00	30.000.000,00	8.000,00	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.08.02.2.02.0004	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	180.000.000,00	1.547.364.700,00	1.367.364.700,00	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	137.850.000,00	37.850.000,00	
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	137.850.000,00	37.850.000,00	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	95.004.700,00	95.004.700,00	
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	95.004.700,00	95.004.700,00	
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000,00	1.314.510.000,00	1.234.510.000,00	
2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	80.000.000,00	1.280.000.000,00	1.200.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	34.510.000,00	34.510.000,00	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	199.733.700,00	200.000.000,00	266.300,00	
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	199.733.700,00	200.000.000,00	266.300,00	
2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	99.999.000,00	100.000.000,00	1.000,00	
2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	99.734.700,00	100.000.000,00	265.300,00	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	316.544.900,00	633.623.000,00	317.078.100,00	
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	159.996.000,00	160.000.000,00	4.000,00	
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	159.996.000,00	160.000.000,00	4.000,00	
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	156.548.900,00	473.623.000,00	317.074.100,00	
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.548.900,00	100.000.000,00	23.451.100,00	
2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000,00	313.623.000,00	233.623.000,00	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	50.000.000,00	325.735.300,00	275.735.300,00	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	100.750.000,00	50.750.000,00	
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	50.000.000,00	100.750.000,00	50.750.000,00	
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	190.475.300,00	190.475.300,00	
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	0,00	140.475.300,00	140.475.300,00	
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	34.510.000,00	34.510.000,00	
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	0,00	34.510.000,00	34.510.000,00	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.654.364.918,00	6.217.417.478,00	563.052.560,00	
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	199.999.950,00	200.000.000,00	50,00	
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	199.999.950,00	200.000.000,00	50,00	
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.054.438.468,00	5.659.847.478,00	605.409.010,00	
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.054.438.468,00	5.659.847.478,00	605.409.010,00	
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	267.627.000,00	287.270.000,00	19.643.000,00	
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.999.000,00	25.000.000,00	1.000,00	
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	242.628.000,00	242.270.000,00	-358.000,00	
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.300.000,00	70.300.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	5.805.816.977,00	7.154.178.665,00	1.348.361.688,00	
2.09.0.00.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan	5.805.816.977,00	7.154.178.665,00	1.348.361.688,00	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	601.829.108,00	782.401.835,00	180.572.727,00	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	274.599.000,00	255.172.000,00	-19.427.000,00	
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	69.999.000,00	60.172.000,00	-9.827.000,00	
2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	64.600.000,00	55.000.000,00	-9.600.000,00	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	139.999.108,00	139.999.035,00	-73,00	
2.09.03.2.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	70.000.000,00	69.999.950,00	-50,00	
2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	69.999.108,00	69.999.085,00	-23,00	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	187.231.000,00	387.230.800,00	199.999.800,00	
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	76.500.000,00	76.500.000,00	0,00	
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	110.731.000,00	310.730.800,00	199.999.800,00	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	155.659.950,00	124.928.500,00	-30.731.450,00	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	99.999.950,00	80.000.000,00	-19.999.950,00	
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	99.999.950,00	80.000.000,00	-19.999.950,00	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	55.660.000,00	44.928.500,00	-10.731.500,00	
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	55.660.000,00	44.928.500,00	-10.731.500,00	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	70.571.800,00	70.571.500,00	-300,00	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	70.571.800,00	70.571.500,00	-300,00	
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	70.571.800,00	70.571.500,00	-300,00	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.977.756.119,00	6.176.276.830,00	1.198.520.711,00	
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.603.547.119,00	5.837.067.830,00	1.233.520.711,00	
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.603.547.119,00	5.837.067.830,00	1.233.520.711,00	
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	329.210.000,00	294.210.000,00	-35.000.000,00	
2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.926.000,00	15.926.000,00	-35.000.000,00	
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	248.284.000,00	248.284.000,00	0,00	
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.999.000,00	19.999.000,00	0,00	
2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.999.000,00	19.999.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	22.438.738.506,00	59.314.915.142,00	36.876.176.636,00	
2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	22.438.738.506,00	59.314.915.142,00	36.876.176.636,00	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.999.998.400,00	2.455.310.050,00	455.311.650,00	
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	999.999.650,00	1.579.450.650,00	579.451.000,00	
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	999.999.650,00	1.579.450.650,00	579.451.000,00	
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	999.998.750,00	875.859.400,00	-124.139.350,00	
2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaa KLHS RPJPD/RPJMD	999.998.750,00	875.859.400,00	-124.139.350,00	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.549.971.476,00	23.683.789.622,00	21.133.818.146,00	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.649.985.000,00	2.478.452.296,00	828.467.296,00	
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	899.994.000,00	778.135.800,00	-121.858.200,00	
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	149.999.000,00	966.764.400,00	816.765.400,00	
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	599.992.000,00	733.552.096,00	133.560.096,00	
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	399.990.476,00	385.897.576,00	-14.092.900,00	
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	399.990.476,00	385.897.576,00	-14.092.900,00	
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	499.996.000,00	20.819.439.750,00	20.319.443.750,00	
2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	499.996.000,00	20.819.439.750,00	20.319.443.750,00	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	3.149.771.000,00	9.095.518.398,00	5.945.747.398,00	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	3.149.771.000,00	9.095.518.398,00	5.945.747.398,00	
2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	696.345.000,00	4.974.003.800,00	4.277.658.800,00	
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.000.000.000,00	3.478.880.716,00	1.478.880.716,00	
2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	53.426.000,00	242.641.700,00	189.215.700,00	
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	200.000.000,00	199.992.182,00	-7.818,00	
2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	561.439.600,00	532.725.750,00	-28.713.850,00	
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	297.470.600,00	292.738.450,00	-4.732.150,00	
2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	98.700.500,00	99.999.000,00	1.298.500,00	
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	198.770.100,00	192.739.450,00	-6.030.650,00	
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	263.969.000,00	239.987.300,00	-23.981.700,00	
2.11.05.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	97.113.000,00	100.000.000,00	2.887.000,00	
2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	166.856.000,00	139.987.300,00	-26.868.700,00	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	79.770.200,00	112.776.650,00	33.006.450,00	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	79.770.200,00	112.776.650,00	33.006.450,00	
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	79.770.200,00	112.776.650,00	33.006.450,00	
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	174.373.600,00	1.541.788.800,00	1.367.415.200,00	
2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	174.373.600,00	1.174.995.600,00	1.000.622.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	174.373.600,00	1.174.995.600,00	1.000.622.000,00	
2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	0,00	366.793.200,00	366.793.200,00	
2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	0,00	366.793.200,00	366.793.200,00	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	595.620.100,00	2.465.318.400,00	1.869.698.300,00	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	595.620.100,00	2.465.318.400,00	1.869.698.300,00	
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	196.576.800,00	799.887.200,00	603.310.400,00	
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	399.043.300,00	1.049.460.200,00	650.416.900,00	
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	0,00	615.971.000,00	615.971.000,00	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	0,00	308.243.000,00	308.243.000,00	
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	308.243.000,00	308.243.000,00	
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	0,00	308.243.000,00	308.243.000,00	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	99.662.000,00	99.916.200,00	254.200,00	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	99.662.000,00	99.916.200,00	254.200,00	
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	99.662.000,00	99.916.200,00	254.200,00	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.398.718.000,00	9.435.338.900,00	5.036.620.900,00	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	4.148.805.000,00	9.189.749.900,00	5.040.944.900,00	
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	199.996.000,00	200.000.000,00	4.000,00	
2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	199.810.000,00	190.320.000,00	-9.490.000,00	
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.699.999.000,00	7.683.541.900,00	4.983.542.900,00	
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	399.814.000,00	485.888.000,00	86.074.000,00	
2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	499.976.000,00	500.000.000,00	24.000,00	
2.11.11.2.01.0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	149.210.000,00	130.000.000,00	-19.210.000,00	
2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	249.913.000,00	245.589.000,00	-4.324.000,00	
2.11.11.2.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	49.994.000,00	50.000.000,00	6.000,00	
2.11.11.2.03.0002	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	99.981.000,00	100.000.000,00	19.000,00	
2.11.11.2.03.0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	99.938.000,00	95.589.000,00	-4.349.000,00	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.829.414.130,00	9.584.189.372,00	754.775.242,00	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	134.997.900,00	233.803.425,00	98.805.525,00	
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.999.725,00	128.629.250,00	103.629.525,00	
2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.999.775,00	9.999.775,00	0,00	
2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	19.999.600,00	19.259.600,00	-740.000,00	
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	49.999.050,00	47.195.050,00	-2.804.000,00	
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.999.750,00	28.719.750,00	-1.280.000,00	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.991.179.780,00	8.203.011.997,00	1.211.832.217,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.991.179.780,00	8.203.011.997,00	1.211.832.217,00	
2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	99.999.450,00	99.999.950,00	500,00	
2.11.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	99.999.450,00	99.999.950,00	500,00	
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	199.185.000,00	199.185.000,00	0,00	
2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	99.850.000,00	99.850.000,00	0,00	
2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	99.335.000,00	99.335.000,00	0,00	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	615.732.000,00	462.889.000,00	-152.843.000,00	
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	179.999.000,00	121.699.000,00	-58.300.000,00	
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.889.000,00	55.889.000,00	0,00	
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	379.844.000,00	285.301.000,00	-94.543.000,00	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.500.000,00	71.500.000,00	0,00	
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249.150.000,00	313.800.000,00	64.650.000,00	
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	249.150.000,00	313.800.000,00	64.650.000,00	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.891.766.114,00	10.233.049.134,00	3.341.283.020,00	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.891.766.114,00	10.233.049.134,00	3.341.283.020,00	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	489.978.700,00	905.156.400,00	415.177.700,00	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	489.978.700,00	905.156.400,00	415.177.700,00	
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	489.978.700,00	905.156.400,00	415.177.700,00	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	99.994.250,00	298.743.250,00	198.749.000,00	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	99.994.250,00	298.743.250,00	198.749.000,00	
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	99.994.250,00	298.743.250,00	198.749.000,00	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	590.178.550,00	1.702.213.550,00	1.112.035.000,00	
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	14.999.800,00	14.999.800,00	0,00	
2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	14.999.800,00	14.999.800,00	0,00	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	397.658.850,00	1.509.693.850,00	1.112.035.000,00	
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	180.000.000,00	1.292.035.000,00	1.112.035.000,00	
2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	49.999.400,00	49.999.400,00	0,00	
2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	89.219.800,00	89.219.800,00	0,00	
2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	49.999.700,00	49.999.700,00	0,00	
2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	28.439.950,00	28.439.950,00	0,00	
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	177.519.900,00	177.519.900,00	0,00	
2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	177.519.900,00	177.519.900,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	48.452.150,00	48.452.150,00	0,00	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	48.452.150,00	48.452.150,00	0,00	
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	48.452.150,00	48.452.150,00	0,00	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.663.162.464,00	7.278.483.784,00	1.615.321.320,00	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.905.823.614,00	6.548.485.234,00	1.642.661.620,00	
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.905.823.614,00	6.548.485.234,00	1.642.661.620,00	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	559.998.850,00	709.998.550,00	149.999.700,00	
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	279.999.500,00	279.999.500,00	0,00	
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	79.999.950,00	79.999.950,00	0,00	
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199.999.400,00	349.999.100,00	149.999.700,00	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9.202.279.191,00	25.480.959.437,00	16.278.680.246,00	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.202.279.191,00	25.480.959.437,00	16.278.680.246,00	
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	271.360.300,00	225.488.300,00	-45.872.000,00	
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	271.360.300,00	225.488.300,00	-45.872.000,00	
2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	99.990.000,00	99.990.000,00	0,00	
2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	125.498.300,00	125.498.300,00	0,00	
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	176.041.500,00	198.914.500,00	22.873.000,00	
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	176.041.500,00	198.914.500,00	22.873.000,00	
2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	127.058.000,00	149.931.000,00	22.873.000,00	
2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	48.983.500,00	48.983.500,00	0,00	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	757.184.120,00	3.714.002.920,00	2.956.818.800,00	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	757.184.120,00	3.714.002.920,00	2.956.818.800,00	
2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	0,00	779.630.150,00	779.630.150,00	
2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	0,00	324.530.000,00	324.530.000,00	
2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	149.997.820,00	149.997.820,00	0,00	
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	0,00	149.999.900,00	149.999.900,00	
2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	468.000,00	1.083.634.700,00	1.083.166.700,00	
2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	99.997.000,00	99.997.000,00	0,00	
2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	179.993.100,00	179.993.100,00	0,00	
2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	0,00	121.353.400,00	121.353.400,00	
2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	49.999.000,00	49.999.000,00	0,00	
2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	99.984.200,00	199.992.400,00	100.008.200,00	
2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	24.999.000,00	124.999.450,00	100.000.450,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	51.758.000,00	49.888.000,00	-1.870.000,00	
2.13.04.2.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	99.988.000,00	99.988.000,00	0,00	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	680.237.400,00	13.134.067.850,00	12.453.830.450,00	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	680.237.400,00	13.134.067.850,00	12.453.830.450,00	
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	150.000.000,00	5.527.000.000,00	5.377.000.000,00	
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	130.194.000,00	4.020.000.150,00	3.889.806.150,00	
2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0,00	380.000.000,00	380.000.000,00	
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	139.994.000,00	139.994.000,00	0,00	
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	149.999.700,00	257.024.000,00	107.024.300,00	
2.13.05.2.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	10.049.700,00	1.010.049.700,00	1.000.000.000,00	
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	100.000.000,00	1.800.000.000,00	1.700.000.000,00	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.317.455.871,00	8.208.485.867,00	891.029.996,00	
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.647.059.119,00	4.902.615.191,00	-744.443.928,00	
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.647.059.119,00	4.902.615.191,00	-744.443.928,00	
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	961.794.724,00	1.464.234.124,00	502.439.400,00	
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	235.704.124,00	235.704.124,00	0,00	
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	98.624.000,00	98.624.000,00	0,00	
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	229.442.600,00	232.136.000,00	2.693.400,00	
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	398.024.000,00	897.770.000,00	499.746.000,00	
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	610.652.000,00	69.756.000,00	-540.896.000,00	
2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.756.000,00	69.756.000,00	0,00	
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.282.028,00	1.722.212.552,00	1.673.930.524,00	
2.13.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.810.000,00	17.810.000,00	0,00	
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.472.028,00	1.704.402.552,00	1.673.930.524,00	
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.668.000,00	49.668.000,00	0,00	
2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.668.000,00	49.668.000,00	0,00	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	175.000.000,00	1.249.300.000,00	1.074.300.000,00	
1.02.2.14.0.00.03.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	175.000.000,00	1.249.300.000,00	1.074.300.000,00	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	175.000.000,00	687.000.000,00	512.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	175.000.000,00	687.000.000,00	512.000.000,00	
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	50.000.000,00	130.000.000,00	80.000.000,00	
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	0,00	47.000.000,00	47.000.000,00	
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	100.000.000,00	280.000.000,00	180.000.000,00	
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	0,00	550.300.000,00	550.300.000,00	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	0,00	21.600.000,00	21.600.000,00	
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	0,00	528.700.000,00	528.700.000,00	
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	0,00	169.000.000,00	169.000.000,00	
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	0,00	359.700.000,00	359.700.000,00	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	12.434.302.972,00	27.002.873.043,00	14.568.570.071,00	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	12.434.302.972,00	27.002.873.043,00	14.568.570.071,00	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	219.770.850,00	4.867.175.012,00	4.647.404.162,00	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	49.927.850,00	49.999.012,00	71.162,00	
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	49.927.850,00	49.999.012,00	71.162,00	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	49.988.000,00	2.979.433.000,00	2.929.445.000,00	
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	49.988.000,00	2.979.433.000,00	2.929.445.000,00	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	19.890.000,00	201.700.000,00	181.810.000,00	
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	19.890.000,00	201.700.000,00	181.810.000,00	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	93.098.000,00	43.098.000,00	
2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	93.098.000,00	43.098.000,00	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	49.965.000,00	1.542.945.000,00	1.492.980.000,00	
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	49.965.000,00	1.542.945.000,00	1.492.980.000,00	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	3.059.845.000,00	9.302.884.000,00	6.243.039.000,00	
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1.059.845.000,00	5.928.988.000,00	4.869.143.000,00	
2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	1.000.000.000,00	5.889.583.000,00	4.889.583.000,00	
2.15.03.2.12.0005	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	59.845.000,00	39.405.000,00	-20.440.000,00	
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	2.000.000.000,00	3.373.896.000,00	1.373.896.000,00	
2.15.03.2.13.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	2.000.000.000,00	3.373.896.000,00	1.373.896.000,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.154.687.122,00	12.832.814.031,00	3.678.126.909,00	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.026.079.922,00	5.709.396.531,00	683.316.609,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.026.079.922,00	5.709.396.531,00	683.316.609,00	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	721.767.200,00	728.349.500,00	6.582.300,00	
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	136.880.000,00	15.018.000,00	-121.862.000,00	
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	174.969.200,00	174.879.050,00	-90.150,00	
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.920.000,00	138.499.450,00	108.579.450,00	
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	379.998.000,00	399.953.000,00	19.955.000,00	
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.623.250.000,00	5.475.305.000,00	2.852.055.000,00	
2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	989.250.000,00	981.710.000,00	-7.540.000,00	
2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000.000,00	4.493.595.000,00	3.493.595.000,00	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	435.000.000,00	434.990.000,00	-10.000,00	
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	350.000.000,00	349.990.000,00	-10.000,00	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	348.590.000,00	484.773.000,00	136.183.000,00	
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.660.000,00	29.193.000,00	-4.467.000,00	
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.930.000,00	14.930.000,00	0,00	
2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300.000.000,00	440.650.000,00	140.650.000,00	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.071.228.185,00	13.431.261.130,00	4.360.032.945,00	
2.16.0.00.0.00.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.071.228.185,00	13.431.261.130,00	4.360.032.945,00	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	291.321.000,00	818.195.400,00	526.874.400,00	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	291.321.000,00	818.195.400,00	526.874.400,00	
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	193.023.000,00	589.591.000,00	396.568.000,00	
2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	98.298.000,00	228.604.400,00	130.306.400,00	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3.225.483.440,00	7.547.357.170,00	4.321.873.730,00	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.426.314.240,00	1.696.771.670,00	270.457.430,00	
2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.426.314.240,00	1.696.771.670,00	270.457.430,00	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.799.169.200,00	5.850.585.500,00	4.051.416.300,00	
2.16.03.2.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	249.392.000,00	245.920.000,00	-3.472.000,00	
2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1.549.777.200,00	5.604.665.500,00	4.054.888.300,00	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.554.423.745,00	5.065.708.560,00	-488.715.185,00	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.439.877.590,00	4.071.228.185,00	-368.649.405,00	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.439.877.590,00	4.071.228.185,00	-368.649.405,00	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.065.046.305,00	944.980.525,00	-120.065.780,00	
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	452.133.000,00	294.981.030,00	-157.151.970,00	
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	274.430.000,00	270.517.995,00	-3.912.005,00	
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288.483.300,00	329.482.000,00	40.998.700,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.16.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50.000.005,00	49.999.500,00	-505,00	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.499.850,00	49.499.850,00	0,00	
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.499.850,00	49.499.850,00	0,00	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	3.400.162.910,00	4.035.362.000,00	635.199.090,00	
3.31.3.30.2.17.02.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.400.162.910,00	4.035.362.000,00	635.199.090,00	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.250.199.910,00	1.084.875.000,00	-165.324.910,00	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1.250.199.910,00	1.084.875.000,00	-165.324.910,00	
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	244.091.000,00	244.091.000,00	0,00	
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	347.787.000,00	349.145.000,00	1.358.000,00	
2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	99.128.000,00	94.208.000,00	-4.920.000,00	
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	45.538.000,00	45.538.000,00	0,00	
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	513.655.910,00	351.893.000,00	-161.762.910,00	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.149.963.000,00	2.950.487.000,00	800.524.000,00	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2.149.963.000,00	2.950.487.000,00	800.524.000,00	
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	2.149.963.000,00	2.950.487.000,00	800.524.000,00	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.393.981.322,00	7.462.040.096,00	2.068.058.774,00	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.393.981.322,00	7.462.040.096,00	2.068.058.774,00	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	10.970.000,00	500.788.000,00	489.818.000,00	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.970.000,00	219.980.000,00	209.010.000,00	
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	10.970.000,00	219.980.000,00	209.010.000,00	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	0,00	280.808.000,00	280.808.000,00	
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	0,00	280.808.000,00	280.808.000,00	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	250.331.400,00	420.513.200,00	170.181.800,00	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	250.331.400,00	420.513.200,00	170.181.800,00	
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	115.984.000,00	187.739.000,00	71.755.000,00	
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	25.006.900,00	122.952.700,00	97.945.800,00	
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	109.340.500,00	109.821.500,00	481.000,00	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	115.948.300,00	194.005.250,00	78.056.950,00	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	115.948.300,00	194.005.250,00	78.056.950,00	
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	16.012.500,00	16.003.000,00	-9.500,00	
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	99.830.200,00	158.118.450,00	58.288.250,00	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	105.600,00	19.883.800,00	19.778.200,00	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	75.382.000,00	74.382.000,00	-1.000.000,00	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75.382.000,00	74.382.000,00	-1.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	75.382.000,00	74.382.000,00	-1.000.000,00	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.941.349.622,00	6.272.351.646,00	1.331.002.024,00	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.510.232.272,00	5.546.959.296,00	1.036.727.024,00	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.510.232.272,00	5.546.959.296,00	1.036.727.024,00	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	73.958.000,00	253.025.000,00	179.067.000,00	
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	73.958.000,00	253.025.000,00	179.067.000,00	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	319.699.350,00	410.087.350,00	90.388.000,00	
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	135.000.000,00	111.819.000,00	-23.181.000,00	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.048.350,00	17.048.350,00	0,00	
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167.651.000,00	281.220.000,00	113.569.000,00	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.460.000,00	62.280.000,00	24.820.000,00	
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.280.000,00	37.280.000,00	0,00	
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	180.000,00	25.000.000,00	24.820.000,00	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	15.001.090.038,00	64.339.694.373,00	49.338.604.335,00	
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	15.001.090.038,00	64.339.694.373,00	49.338.604.335,00	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.774.931.850,00	7.392.315.350,00	4.617.383.500,00	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	374.999.850,00	743.886.850,00	368.887.000,00	
2.19.02.2.01.0005	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	0,00	399.997.000,00	399.997.000,00	
2.19.02.2.01.0006	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	374.999.850,00	343.889.850,00	-31.110.000,00	
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.399.932.000,00	6.648.428.500,00	4.248.496.500,00	
2.19.02.2.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	1.999.936.000,00	1.995.616.000,00	-4.320.000,00	
2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	399.996.000,00	4.652.812.500,00	4.252.816.500,00	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	6.541.888.000,00	49.905.301.168,00	43.363.413.168,00	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	549.999.750,00	37.967.016.918,00	37.417.017.168,00	
2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	549.999.750,00	37.967.016.918,00	37.417.017.168,00	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.500.000.000,00	4.801.200.000,00	3.301.200.000,00	
2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1.500.000.000,00	3.964.100.000,00	2.464.100.000,00	
2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	0,00	445.194.000,00	445.194.000,00	
2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	0,00	391.906.000,00	391.906.000,00	
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	149.999.950,00	394.346.950,00	244.347.000,00	
2.19.03.2.03.0001	Seleksi Atlet Daerah	149.999.950,00	123.594.950,00	-26.405.000,00	
2.19.03.2.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	0,00	270.752.000,00	270.752.000,00	
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	4.000.000.000,00	6.408.704.000,00	2.408.704.000,00	
2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	0,00	1.208.704.000,00	1.208.704.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.19.03.2.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	4.000.000.000,00	5.200.000.000,00	1.200.000.000,00	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	341.888.300,00	334.033.300,00	-7.855.000,00	
2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	341.888.300,00	334.033.300,00	-7.855.000,00	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	549.995.000,00	549.995.000,00	0,00	
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	549.995.000,00	549.995.000,00	0,00	
2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	49.995.000,00	49.995.000,00	0,00	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.134.275.188,00	6.492.082.855,00	1.357.807.667,00	
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.301.172.627,00	5.417.709.564,00	1.116.536.937,00	
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.301.172.627,00	5.417.709.564,00	1.116.536.937,00	
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	583.980.000,00	825.260.000,00	241.280.000,00	
2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.981.000,00	302.181.000,00	258.200.000,00	
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	499.999.000,00	483.079.000,00	-16.920.000,00	
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.380.000,00	151.380.000,00	0,00	
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	151.380.000,00	151.380.000,00	0,00	
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.742.561,00	97.733.291,00	-9.270,00	
2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	97.742.561,00	97.733.291,00	-9.270,00	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	8.030.585.030,00	11.374.712.774,00	3.344.127.744,00	
2.22.3.26.0.00.03.0000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	8.030.585.030,00	11.374.712.774,00	3.344.127.744,00	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	298.061.450,00	1.185.135.150,00	887.073.700,00	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	298.061.450,00	367.674.500,00	69.613.050,00	
2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	298.061.450,00	367.674.500,00	69.613.050,00	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	817.460.650,00	817.460.650,00	
2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	0,00	817.460.650,00	817.460.650,00	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	508.412.645,00	2.798.470.250,00	2.290.057.605,00	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	508.412.645,00	2.798.470.250,00	2.290.057.605,00	
2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	259.670.000,00	584.152.100,00	324.482.100,00	
2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	248.742.645,00	2.214.318.150,00	1.965.575.505,00	
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	149.996.350,00	150.799.100,00	802.750,00	
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	149.996.350,00	150.799.100,00	802.750,00	
2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	149.996.350,00	150.799.100,00	802.750,00	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	223.724.565,00	249.997.500,00	26.272.935,00	
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	223.724.565,00	249.997.500,00	26.272.935,00	
2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	123.724.700,00	149.998.750,00	26.274.050,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	99.999.865,00	99.998.750,00	-1.115,00	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.850.390.020,00	6.990.310.774,00	139.920.754,00	
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.040.633.520,00	6.124.447.474,00	83.813.954,00	
2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.040.633.520,00	6.124.447.474,00	83.813.954,00	
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	755.772.500,00	780.260.100,00	24.487.600,00	
2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.187.000,00	97.293.700,00	106.700,00	
2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.094.900,00	48.206.400,00	28.111.500,00	
2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	488.682.000,00	634.760.000,00	146.078.000,00	
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.984.000,00	85.603.200,00	31.619.200,00	
2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.984.000,00	85.603.200,00	31.619.200,00	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4.606.006.848,00	6.653.004.007,00	2.046.997.159,00	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.606.006.848,00	6.653.004.007,00	2.046.997.159,00	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	114.472.750,00	1.120.152.689,00	1.005.679.939,00	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.736.000,00	348.237.000,00	298.501.000,00	
2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	24.964.000,00	323.465.000,00	298.501.000,00	
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	24.772.000,00	24.772.000,00	0,00	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	64.736.750,00	771.915.689,00	707.178.939,00	
2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	24.989.750,00	122.528.500,00	97.538.750,00	
2.23.02.2.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	499.732.539,00	499.732.539,00	
2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	19.752.000,00	117.984.650,00	98.232.650,00	
2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	19.995.000,00	31.670.000,00	11.675.000,00	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.491.534.098,00	5.532.851.318,00	1.041.317.220,00	
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.185.510.398,00	4.580.581.670,00	395.071.272,00	
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.185.510.398,00	4.580.581.670,00	395.071.272,00	
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	256.228.700,00	720.158.648,00	463.929.948,00	
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.407.800,00	327.006.848,00	240.599.048,00	
2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.868.000,00	52.701.800,00	32.833.800,00	
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.999.900,00	54.635.000,00	34.635.100,00	
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129.953.000,00	285.815.000,00	155.862.000,00	
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.820.000,00	99.866.000,00	75.046.000,00	
2.23.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.820.000,00	99.866.000,00	75.046.000,00	
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.975.000,00	132.245.000,00	107.270.000,00	
2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.975.000,00	132.245.000,00	107.270.000,00	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	154.503.550,00	612.552.090,00	458.048.540,00	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	139.503.550,00	597.552.090,00	458.048.540,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	59.754.000,00	369.687.590,00	309.933.590,00	
2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	0,00	206.106.750,00	206.106.750,00	
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	39.820.000,00	91.654.840,00	51.834.840,00	
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	19.934.000,00	71.926.000,00	51.992.000,00	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	79.749.550,00	227.864.500,00	148.114.950,00	
2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	39.999.550,00	118.539.000,00	78.539.450,00	
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	39.750.000,00	109.325.500,00	69.575.500,00	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.956.885.600,00	7.890.324.728,00	1.933.439.128,00	
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	5.956.885.600,00	7.890.324.728,00	1.933.439.128,00	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	524.995.750,00	525.000.000,00	4.250,00	
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	524.995.750,00	525.000.000,00	4.250,00	
3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	24.999.750,00	25.000.000,00	250,00	
3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	499.996.000,00	500.000.000,00	4.000,00	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.126.567.850,00	2.155.066.950,00	1.028.499.100,00	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	124.986.500,00	165.800.000,00	40.813.500,00	
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	124.986.500,00	165.800.000,00	40.813.500,00	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.001.581.350,00	1.989.266.950,00	987.685.600,00	
3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	229.995.000,00	230.000.000,00	5.000,00	
3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	746.586.350,00	1.734.266.950,00	987.680.600,00	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	0,00	35.375.900,00	35.375.900,00	
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	0,00	35.375.900,00	35.375.900,00	
3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	0,00	35.375.900,00	35.375.900,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.305.322.000,00	5.174.881.878,00	869.559.878,00	
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.756.928.000,00	4.591.385.578,00	834.457.578,00	
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.756.928.000,00	4.591.385.578,00	834.457.578,00	
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	534.094.000,00	569.216.000,00	35.122.000,00	
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000,00	41.150.000,00	1.150.000,00	
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	42.082.500,00	34.082.500,00	
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	446.094.000,00	445.983.500,00	-110.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.300.000,00	14.280.300,00	-19.700,00	
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.300.000,00	14.280.300,00	-19.700,00	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.327.097.200,00	9.734.410.175,00	6.407.312.975,00	
2.22.3.26.0.00.03.0000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.327.097.200,00	9.734.410.175,00	6.407.312.975,00	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2.436.058.400,00	7.709.406.700,00	5.273.348.300,00	
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	2.159.426.000,00	4.297.415.100,00	2.137.989.100,00	
3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	0,00	3.749.945.100,00	3.749.945.100,00	
3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	2.159.426.000,00	547.470.000,00	-1.611.956.000,00	
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	3.411.991.600,00	3.411.991.600,00	
3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	290.200.000,00	290.200.000,00	
3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	2.357.095.600,00	2.357.095.600,00	
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	559.774.000,00	559.774.000,00	
3.26.02.2.03.0008	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	204.922.000,00	204.922.000,00	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	559.856.300,00	1.687.532.850,00	1.127.676.550,00	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	559.856.300,00	1.687.532.850,00	1.127.676.550,00	
3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	84.981.500,00	220.600.000,00	135.618.500,00	
3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	149.984.400,00	204.864.900,00	54.880.500,00	
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	244.745.900,00	1.072.516.950,00	827.771.050,00	
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	80.144.500,00	189.551.000,00	109.406.500,00	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	331.182.500,00	337.470.625,00	6.288.125,00	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	212.673.500,00	223.771.125,00	11.097.625,00	
3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	212.673.500,00	223.771.125,00	11.097.625,00	
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	118.509.000,00	113.699.500,00	-4.809.500,00	
3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	118.509.000,00	113.699.500,00	-4.809.500,00	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	15.860.457.000,00	51.399.035.974,00	35.538.578.974,00	
3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pertanian	15.860.457.000,00	51.399.035.974,00	35.538.578.974,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	827.187.959,00	27.412.081.240,00	26.584.893.281,00	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	249.939.200,00	6.572.333.800,00	6.322.394.600,00	
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	249.939.200,00	6.572.333.800,00	6.322.394.600,00	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	577.248.759,00	849.954.340,00	272.705.581,00	
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	427.285.940,00	699.966.440,00	272.680.500,00	
3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	149.962.819,00	149.987.900,00	25.081,00	
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	499.995.100,00	499.995.100,00	
3.27.02.2.05.0004	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	0,00	499.995.100,00	499.995.100,00	
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	0,00	19.489.798.000,00	19.489.798.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	0,00	19.489.798.000,00	19.489.798.000,00	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.043.073.670,00	8.115.574.014,00	6.072.500.344,00	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	2.043.073.670,00	6.264.064.170,00	4.220.990.500,00	
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	418.077.770,00	2.408.865.320,00	1.990.787.550,00	
3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	549.996.000,00	2.780.198.950,00	2.230.202.950,00	
3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	1.074.999.900,00	1.074.999.900,00	0,00	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	0,00	1.851.509.844,00	1.851.509.844,00	
3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	0,00	1.851.509.844,00	1.851.509.844,00	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	447.188.238,00	499.970.400,00	52.782.162,00	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	0,00	199.991.000,00	199.991.000,00	
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	199.991.000,00	199.991.000,00	
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	149.984.400,00	149.984.400,00	
3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	0,00	149.984.400,00	149.984.400,00	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	447.188.238,00	149.995.000,00	-297.193.238,00	
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	145.702.000,00	149.995.000,00	4.293.000,00	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	349.985.600,00	349.998.850,00	13.250,00	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	349.985.600,00	349.998.850,00	13.250,00	
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	149.989.000,00	149.999.000,00	10.000,00	
3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	199.996.600,00	199.999.850,00	3.250,00	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	99.996.428,00	99.874.000,00	-122.428,00	
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	99.996.428,00	99.874.000,00	-122.428,00	
3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	99.996.428,00	99.874.000,00	-122.428,00	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	349.993.000,00	1.107.791.400,00	757.798.400,00	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	349.993.000,00	1.107.791.400,00	757.798.400,00	
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	149.998.000,00	907.799.000,00	757.801.000,00	
3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	199.995.000,00	199.992.400,00	-2.600,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.743.032.105,00	13.813.746.070,00	2.070.713.965,00	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.300.621.035,00	12.480.207.000,00	1.179.585.965,00	
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.300.621.035,00	12.480.207.000,00	1.179.585.965,00	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	442.411.070,00	467.139.070,00	24.728.000,00	
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.998.320,00	99.955.320,00	-43.000,00	
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.499.750,00	42.499.750,00	0,00	
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	299.913.000,00	324.684.000,00	24.771.000,00	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	866.400.000,00	866.400.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	866.400.000,00	866.400.000,00	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	7.947.520.340,00	10.581.440.270,00	2.633.919.930,00	
3.31.3.30.2.17.02.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.947.520.340,00	10.581.440.270,00	2.633.919.930,00	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	520.617.600,00	1.914.029.250,00	1.393.411.650,00	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	520.617.600,00	1.914.029.250,00	1.393.411.650,00	
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	520.617.600,00	1.914.029.250,00	1.393.411.650,00	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	883.604.000,00	862.464.000,00	-21.140.000,00	
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	99.754.000,00	89.984.000,00	-9.770.000,00	
3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	99.754.000,00	89.984.000,00	-9.770.000,00	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	783.850.000,00	772.480.000,00	-11.370.000,00	
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	84.210.000,00	84.210.000,00	0,00	
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	699.640.000,00	688.270.000,00	-11.370.000,00	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	141.228.000,00	73.543.000,00	-67.685.000,00	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	141.228.000,00	73.543.000,00	-67.685.000,00	
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	141.228.000,00	73.543.000,00	-67.685.000,00	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	0,00	138.773.500,00	138.773.500,00	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	0,00	138.773.500,00	138.773.500,00	
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	0,00	138.773.500,00	138.773.500,00	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.402.070.740,00	7.592.630.520,00	1.190.559.780,00	
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.632.918.740,00	6.903.478.520,00	1.270.559.780,00	
3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.632.918.740,00	6.903.478.520,00	1.270.559.780,00	
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	566.642.000,00	523.132.000,00	-43.510.000,00	
3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.180.000,00	46.450.000,00	-48.730.000,00	
3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	159.057.000,00	159.057.000,00	0,00	
3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.780.000,00	25.000.000,00	5.220.000,00	
3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	292.625.000,00	292.625.000,00	0,00	
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	
3.30.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.510.000,00	100.020.000,00	-36.490.000,00	
3.30.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	136.510.000,00	100.020.000,00	-36.490.000,00	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.392.726.750,00	2.802.807.050,00	1.410.080.300,00	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.128.628.350,00	2.637.179.850,00	1.508.551.500,00	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.128.628.350,00	2.637.179.850,00	1.508.551.500,00	
3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	119.916.000,00	227.717.000,00	107.801.000,00	
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	608.770.850,00	325.812.800,00	-282.958.050,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	0,00	1.020.663.200,00	1.020.663.200,00	
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	399.941.500,00	1.062.986.850,00	663.045.350,00	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	264.098.400,00	165.627.200,00	-98.471.200,00	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUi, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	264.098.400,00	165.627.200,00	-98.471.200,00	
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	264.098.400,00	165.627.200,00	-98.471.200,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	217.024.590.949,00	487.216.764.266,00	270.192.173.317,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	0,00	33.420.326.625,00	33.420.326.625,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	33.420.326.625,00	33.420.326.625,00	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0,00	32.797.923.269,00	32.797.923.269,00	
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	32.797.923.269,00	32.797.923.269,00	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	622.403.356,00	622.403.356,00	
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	622.403.356,00	622.403.356,00	
4.01.0.00.0.00.01.0001	Bagian Perencanaan dan Keuangan	50.162.844.612,00	1.333.102.800,00	-48.829.741.812,00	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48.407.338.456,00	200.000.000,00	-48.207.338.456,00	
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	783.102.800,00	783.102.800,00	0,00	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	323.102.800,00	323.102.800,00	0,00	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	430.000.000,00	430.000.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0002	Bagian Hukum	87.517.300,00	1.450.308.500,00	1.362.791.200,00	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	56.655.750,00	1.360.444.000,00	1.303.788.250,00	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	56.655.750,00	1.360.444.000,00	1.303.788.250,00	
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	56.655.750,00	172.999.550,00	116.343.800,00	
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	0,00	992.449.050,00	992.449.050,00	
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	0,00	194.995.400,00	194.995.400,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.861.550,00	89.864.500,00	59.002.950,00	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.861.550,00	89.864.500,00	59.002.950,00	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.861.550,00	19.999.500,00	-10.862.050,00	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	69.865.000,00	69.865.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.0.00.0.00.01.0003	Bagian Tata Pemerintahan	1.000.000.000,00	3.690.124.464,00	2.690.124.464,00	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.000.000.000,00	3.690.124.464,00	2.690.124.464,00	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	1.000.000.000,00	3.690.124.464,00	2.690.124.464,00	
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	300.000.000,00	959.285.044,00	659.285.044,00	
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	550.000.000,00	2.580.839.420,00	2.030.839.420,00	
4.01.0.00.0.00.01.0004	Bagian Kesejahteraan Rakyat	27.699.998.650,00	107.588.090.354,00	79.888.091.704,00	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	27.699.998.650,00	107.588.090.354,00	79.888.091.704,00	
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	17.649.987.200,00	63.649.987.200,00	46.000.000.000,00	
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	7.391.131.900,00	35.368.189.900,00	27.977.058.000,00	
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	2.658.879.550,00	8.569.913.254,00	5.911.033.704,00	
4.01.0.00.0.00.01.0005	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	25.687.126.200,00	65.499.796.940,00	39.812.670.740,00	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	25.687.126.200,00	65.499.796.940,00	39.812.670.740,00	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	20.660.986.200,00	46.868.445.940,00	26.207.459.740,00	
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	100.000.000,00	205.807.380,00	105.807.380,00	
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	20.480.986.550,00	46.350.448.560,00	25.869.462.010,00	
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	79.999.650,00	312.190.000,00	232.190.350,00	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	5.026.140.000,00	18.631.351.000,00	13.605.211.000,00	
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	5.026.140.000,00	18.631.351.000,00	13.605.211.000,00	
4.01.0.00.0.00.01.0006	Bagian Administrasi Pembangunan	698.975.639,00	2.032.429.912,00	1.333.454.273,00	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	241.990.000,00	1.653.862.618,00	1.411.872.618,00	
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	99.992.000,00	99.934.500,00	-57.500,00	
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	141.998.000,00	1.403.163.118,00	1.261.165.118,00	
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	0,00	150.765.000,00	150.765.000,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	456.985.639,00	378.567.294,00	-78.418.345,00	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.499.995,00	83.187.650,00	26.687.655,00	
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	56.499.995,00	83.187.650,00	26.687.655,00	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	134.005.644,00	80.999.644,00	-53.006.000,00	
4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	80.999.644,00	80.999.644,00	0,00	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	248.892.000,00	196.792.000,00	-52.100.000,00	
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.400.000,00	57.800.000,00	-38.600.000,00	
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.892.000,00	117.392.000,00	-13.500.000,00	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.588.000,00	17.588.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.588.000,00	17.588.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0007	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	900.000.000,00	1.205.720.699,00	305.720.699,00	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	864.480.193,00	1.173.007.360,00	308.527.167,00	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	864.480.193,00	1.173.007.360,00	308.527.167,00	
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	172.353.000,00	571.853.100,00	399.500.100,00	
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	310.205.553,00	226.842.900,00	-83.362.653,00	
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	381.921.640,00	374.311.360,00	-7.610.280,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.519.807,00	32.713.339,00	-2.806.468,00	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.449.807,00	14.632.258,00	-817.549,00	
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.249.807,00	7.432.258,00	-817.549,00	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.070.000,00	18.081.081,00	-1.988.919,00	
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.070.000,00	18.081.081,00	-1.988.919,00	
4.01.0.00.0.00.01.0008	Bagian Organisasi	139.449.120,00	4.112.694.134,00	3.973.245.014,00	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	139.449.120,00	4.112.694.134,00	3.973.245.014,00	
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	0,00	1.041.344.400,00	1.041.344.400,00	
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	42.392.120,00	366.435.499,00	324.043.379,00	
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	0,00	280.066.485,00	280.066.485,00	
4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	0,00	1.464.279.400,00	1.464.279.400,00	
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	97.057.000,00	960.568.350,00	863.511.350,00	
4.01.0.00.0.00.01.0009	Bagian Umum	109.248.829.178,00	254.361.363.588,00	145.112.534.410,00	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.588.307.261,00	64.430.199.395,00	60.841.892.134,00	
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.992.000,00	10.819.767.000,00	10.618.775.000,00	
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.485.335.346,00	13.296.705.895,00	11.811.370.549,00	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	199.754.000,00	199.602.500,00	-151.500,00	
4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.502.225.915,00	39.914.124.000,00	38.411.898.085,00	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.443.688.432,00	33.767.363.132,00	32.323.674.700,00	
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	613.995.000,00	16.500.000.000,00	15.886.005.000,00	
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	199.930.300,00	1.015.600.000,00	815.669.700,00	
4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	629.763.132,00	16.251.763.132,00	15.622.000.000,00	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.247.721.235,00	104.361.406.761,00	4.113.685.526,00	
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.876.760.004,00	11.070.925.530,00	6.194.165.526,00	
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	382.581.000,00	4.997.781.000,00	4.615.200.000,00	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	94.988.380.231,00	88.292.700.231,00	-6.695.680.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.211.354.250,00	36.338.801.800,00	34.127.447.550,00	
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	361.096.000,00	1.259.800.000,00	898.704.000,00	
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	211.797.000,00	31.649.601.800,00	31.437.804.800,00	
4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.638.461.250,00	3.429.400.000,00	1.790.938.750,00	
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.757.758.000,00	15.463.592.500,00	13.705.834.500,00	
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.311.115.000,00	9.128.953.500,00	7.817.838.500,00	
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	191.010.000,00	4.520.872.000,00	4.329.862.000,00	
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	255.633.000,00	1.813.767.000,00	1.558.134.000,00	
4.01.0.00.0.00.01.0010	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.399.850.250,00	12.522.806.250,00	11.122.956.000,00	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	99.969.000,00	395.735.000,00	295.766.000,00	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	99.969.000,00	395.735.000,00	295.766.000,00	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.299.881.250,00	12.127.071.250,00	10.827.190.000,00	
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	190.040.000,00	4.924.530.000,00	4.734.490.000,00	
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	99.841.250,00	67.841.250,00	-32.000.000,00	
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1.010.000.000,00	7.134.700.000,00	6.124.700.000,00	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	37.534.345.771,00	60.242.788.926,00	22.708.443.155,00	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	37.534.345.771,00	60.242.788.926,00	22.708.443.155,00	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	14.471.557.500,00	32.267.410.000,00	17.795.852.500,00	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2.999.232.000,00	5.832.992.000,00	2.833.760.000,00	
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.999.232.000,00	5.832.992.000,00	2.833.760.000,00	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.022.350.000,00	1.224.200.000,00	201.850.000,00	
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	376.850.000,00	621.600.000,00	244.750.000,00	
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	645.500.000,00	602.600.000,00	-42.900.000,00	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	396.311.200,00	615.048.000,00	218.736.800,00	
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	396.311.200,00	615.048.000,00	218.736.800,00	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	426.564.000,00	1.799.353.000,00	1.372.789.000,00	
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	426.564.000,00	1.799.353.000,00	1.372.789.000,00	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	6.096.284.300,00	12.179.165.000,00	6.082.880.700,00	
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	1.256.525.300,00	7.329.399.000,00	6.072.873.700,00	
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	4.839.759.000,00	4.849.766.000,00	10.007.000,00	
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	53.000.000,00	120.480.000,00	67.480.000,00	
4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	53.000.000,00	120.480.000,00	67.480.000,00	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	3.477.816.000,00	10.496.172.000,00	7.018.356.000,00	
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3.148.758.000,00	9.951.138.000,00	6.802.380.000,00	
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	329.058.000,00	545.034.000,00	215.976.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.062.788.271,00	27.975.378.926,00	4.912.590.655,00	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.778.140.110,00	5.713.619.968,00	935.479.858,00	
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.778.140.110,00	5.713.619.968,00	935.479.858,00	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	893.384.500,00	2.734.650.000,00	1.841.265.500,00	
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	217.410.500,00	556.914.000,00	339.503.500,00	
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	276.167.000,00	305.214.000,00	29.047.000,00	
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	199.945.000,00	416.760.000,00	216.815.000,00	
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199.862.000,00	1.455.762.000,00	1.255.900.000,00	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.678.965.534,00	615.300.000,00	-2.063.665.534,00	
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	380.000.050,00	615.300.000,00	235.299.950,00	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	474.686.000,00	430.560.000,00	-44.126.000,00	
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.680.000,00	336.600.000,00	261.920.000,00	
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.020.000,00	93.960.000,00	-56.060.000,00	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	10.746.485.927,00	12.714.900.358,00	1.968.414.431,00	
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	9.948.445.927,00	10.849.266.358,00	900.820.431,00	
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	190.000.000,00	590.000.000,00	400.000.000,00	
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	608.040.000,00	1.275.634.000,00	667.594.000,00	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	3.241.450.200,00	5.766.348.600,00	2.524.898.400,00	
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	241.456.200,00	724.368.600,00	482.912.400,00	
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	2.999.994.000,00	5.041.980.000,00	2.041.986.000,00	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5.01	PERENCANAAN	13.537.361.900,00	21.096.218.976,00	7.558.857.076,00	
5.01.5.05.0.00.02.0000	Bappeda dan Litbang	13.537.361.900,00	21.096.218.976,00	7.558.857.076,00	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.399.656.020,00	6.128.612.500,00	4.728.956.480,00	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.074.754.200,00	4.005.967.100,00	2.931.212.900,00	
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	99.977.000,00	148.207.000,00	48.230.000,00	
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	149.990.000,00	150.000.000,00	10.000,00	
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	324.832.200,00	579.297.700,00	254.465.500,00	
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	499.955.000,00	3.128.462.400,00	2.628.507.400,00	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	99.944.820,00	543.287.800,00	443.342.980,00	
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	49.988.000,00	49.998.000,00	10.000,00	
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	0,00	256.973.400,00	256.973.400,00	
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	49.956.820,00	236.316.400,00	186.359.580,00	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	224.957.000,00	1.579.357.600,00	1.354.400.600,00	
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	224.957.000,00	1.579.357.600,00	1.354.400.600,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	769.120.580,00	1.491.131.000,00	722.010.420,00	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	269.977.850,00	1.000.305.400,00	730.327.550,00	
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	19.987.000,00	19.987.000,00	0,00	
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	249.990.850,00	980.318.400,00	730.327.550,00	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	249.162.530,00	255.453.000,00	6.290.470,00	
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	119.841.780,00	106.165.000,00	-13.676.780,00	
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	29.946.600,00	49.927.000,00	19.980.400,00	
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	99.374.150,00	99.361.000,00	-13.150,00	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	249.980.200,00	235.372.600,00	-14.607.600,00	
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	29.992.000,00	29.992.000,00	0,00	
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	219.988.200,00	205.380.600,00	-14.607.600,00	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.368.585.300,00	13.476.475.476,00	2.107.890.176,00	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.689.193.000,00	10.952.782.944,00	1.263.589.944,00	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.689.193.000,00	10.952.782.944,00	1.263.589.944,00	
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	299.858.000,00	598.564.000,00	298.706.000,00	
5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	299.858.000,00	598.564.000,00	298.706.000,00	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.129.561.800,00	1.682.848.532,00	553.286.732,00	
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.056.000,00	179.440.000,00	29.384.000,00	
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.877.000,00	99.984.000,00	107.000,00	
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	809.758.800,00	1.333.434.532,00	523.675.732,00	
5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	69.870.000,00	69.990.000,00	120.000,00	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.972.500,00	149.200.000,00	-772.500,00	
5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.972.500,00	149.200.000,00	-772.500,00	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.000.000,00	93.080.000,00	-6.920.000,00	
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000,00	93.080.000,00	-6.920.000,00	
5.02	KEUANGAN	415.385.809.771,00	591.978.635.125,66	176.592.825.354,66	
5.02.0.00.0.00.05.0000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	415.385.809.771,00	591.978.635.125,66	176.592.825.354,66	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	351.506.346.647,00	530.645.649.003,66	179.139.302.356,66	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	8.099.033.500,00	9.299.733.500,00	1.200.700.000,00	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	200.000.000,00	400.642.500,00	200.642.500,00	
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	199.999.500,00	249.990.500,00	49.991.000,00	
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	99.996.000,00	499.988.000,00	399.992.000,00	
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	99.994.500,00	499.994.500,00	400.000.000,00	
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	99.416.000,00	199.993.000,00	100.577.000,00	
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	99.984.000,00	199.994.000,00	100.010.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.999.968.000,00	1.999.968.000,00	0,00	
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1.999.809.000,00	1.999.809.000,00	0,00	
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	599.918.000,00	1.499.996.000,00	900.078.000,00	
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	199.999.500,00	399.996.000,00	199.996.500,00	
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	499.968.000,00	499.968.000,00	0,00	
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1.999.981.000,00	849.394.000,00	-1.150.587.000,00	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	2.187.288.000,00	2.147.288.000,00	-40.000.000,00	
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	599.996.000,00	599.996.000,00	0,00	
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	299.957.000,00	299.957.000,00	0,00	
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	199.953.000,00	199.953.000,00	0,00	
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	399.986.000,00	359.986.000,00	-40.000.000,00	
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemetongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	299.928.000,00	299.928.000,00	0,00	
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	387.468.000,00	387.468.000,00	0,00	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.499.902.500,00	2.499.906.500,00	4.000,00	
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	399.996.000,00	399.996.000,00	0,00	
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	499.982.000,00	499.982.000,00	0,00	
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	399.938.000,00	399.938.000,00	0,00	
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	999.996.000,00	1.000.000.000,00	4.000,00	
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	199.990.500,00	199.990.500,00	0,00	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	337.820.189.647,00	515.449.024.003,66	177.628.834.356,66	
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	337.820.189.647,00	318.371.258.700,00	-19.448.930.947,00	
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0,00	195.579.225.703,66	195.579.225.703,66	
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	0,00	1.498.539.600,00	1.498.539.600,00	
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	899.933.000,00	1.249.697.000,00	349.764.000,00	
5.02.02.2.05.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	99.996.000,00	449.760.000,00	349.764.000,00	
5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	199.994.000,00	199.994.000,00	0,00	
5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	599.943.000,00	599.943.000,00	0,00	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.999.911.300,00	4.572.230.000,00	2.572.318.700,00	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.999.911.300,00	4.572.230.000,00	2.572.318.700,00	
5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	199.988.100,00	199.988.100,00	0,00	
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	499.989.500,00	499.989.500,00	0,00	
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	0,00	2.572.318.700,00	2.572.318.700,00	
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	399.985.500,00	399.985.500,00	0,00	
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	299.991.000,00	299.991.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	399.990.200,00	399.990.200,00	0,00	
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	199.967.000,00	199.967.000,00	0,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.792.140.000,00	5.445.795.500,00	653.655.500,00	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.792.140.000,00	5.445.795.500,00	653.655.500,00	
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	599.931.000,00	599.931.000,00	0,00	
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	1.000.000.000,00	1.667.917.500,00	667.917.500,00	
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	99.908.000,00	99.908.000,00	0,00	
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	299.895.000,00	299.749.000,00	-146.000,00	
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	398.750.000,00	398.750.000,00	0,00	
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	199.912.000,00	199.912.000,00	0,00	
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	199.931.000,00	199.931.000,00	0,00	
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	398.314.000,00	384.198.000,00	-14.116.000,00	
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	399.959.000,00	399.959.000,00	0,00	
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	599.072.000,00	599.072.000,00	0,00	
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	596.468.000,00	596.468.000,00	0,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	57.087.411.824,00	51.314.960.622,00	-5.772.451.202,00	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	999.864.500,00	1.512.862.500,00	512.998.000,00	
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	99.936.000,00	612.956.000,00	513.020.000,00	
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	99.956.000,00	99.941.000,00	-15.000,00	
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	399.989.500,00	399.989.500,00	0,00	
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	399.983.000,00	399.976.000,00	-7.000,00	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	53.137.553.824,00	44.261.146.622,00	-8.876.407.202,00	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	48.589.269.824,00	38.111.165.622,00	-10.478.104.202,00	
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.548.284.000,00	6.149.981.000,00	1.601.697.000,00	
5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	49.999.500,00	49.999.500,00	0,00	
5.02.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	49.999.500,00	49.999.500,00	0,00	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	999.997.000,00	1.499.717.000,00	499.720.000,00	
5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	299.997.000,00	299.720.000,00	-277.000,00	
5.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	400.000.000,00	899.997.000,00	499.997.000,00	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.899.997.000,00	3.991.235.000,00	2.091.238.000,00	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	600.000.000,00	311.995.000,00	-288.005.000,00	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	299.999.000,00	587.999.000,00	288.000.000,00	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	999.998.000,00	3.091.241.000,00	2.091.243.000,00	
5.03	KEPEGAWAIAN	8.342.172.039,00	22.280.798.197,00	13.938.626.158,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	8.342.172.039,00	22.280.798.197,00	13.938.626.158,00	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	958.685.420,00	15.055.153.610,00	14.096.468.190,00	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	123.392.000,00	618.835.000,00	495.443.000,00	
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	0,00	49.886.000,00	49.886.000,00	
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	0,00	49.854.000,00	49.854.000,00	
5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	40.283.000,00	49.977.000,00	9.694.000,00	
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	0,00	249.970.000,00	249.970.000,00	
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	44.887.000,00	179.286.000,00	134.399.000,00	
5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	38.222.000,00	39.862.000,00	1.640.000,00	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	126.236.720,00	528.731.000,00	402.494.280,00	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	48.892.000,00	294.142.000,00	245.250.000,00	
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	77.344.720,00	174.589.000,00	97.244.280,00	
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	528.839.700,00	11.485.143.950,00	10.956.304.250,00	
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	61.709.700,00	346.490.000,00	284.780.300,00	
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	88.992.000,00	150.000.000,00	61.008.000,00	
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	378.138.000,00	10.988.653.950,00	10.610.515.950,00	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	180.217.000,00	2.422.443.660,00	2.242.226.660,00	
5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	0,00	2.022.445.000,00	2.022.445.000,00	
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	62.398.000,00	70.000.000,00	7.602.000,00	
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	64.003.000,00	69.998.660,00	5.995.660,00	
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	27.322.000,00	30.000.000,00	2.678.000,00	
5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	26.494.000,00	30.000.000,00	3.506.000,00	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.413.897.619,00	7.273.943.587,00	-139.954.032,00	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.866.870.619,00	6.464.395.437,00	-402.475.182,00	
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.866.870.619,00	6.464.395.437,00	-402.475.182,00	
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.411.000,00	353.042.000,00	322.631.000,00	
5.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0,00	154.743.000,00	154.743.000,00	
5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	516.616.000,00	456.506.150,00	-60.109.850,00	
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.791.000,00	99.998.150,00	9.207.150,00	
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.610.000,00	50.000.000,00	390.000,00	
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	306.570.000,00	306.508.000,00	-62.000,00	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.049.949.000,00	6.061.974.000,00	5.012.025.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.019.538.000,00	6.013.675.000,00	4.994.137.000,00	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.019.538.000,00	6.013.675.000,00	4.994.137.000,00	
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.019.538.000,00	6.013.675.000,00	4.994.137.000,00	
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.413.897.619,00	7.273.943.587,00	-139.954.032,00	
5.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.411.000,00	353.042.000,00	322.631.000,00	
5.04.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	30.411.000,00	48.299.000,00	17.888.000,00	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	249.988.000,00	810.738.800,00	560.750.800,00	
5.01.5.05.0.00.02.0000	Bappeda dan Litbang	249.988.000,00	810.738.800,00	560.750.800,00	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	249.988.000,00	810.738.800,00	560.750.800,00	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	249.988.000,00	231.949.000,00	-18.039.000,00	
5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	249.988.000,00	231.949.000,00	-18.039.000,00	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	0,00	578.789.800,00	578.789.800,00	
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	0,00	578.789.800,00	578.789.800,00	
5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN	4.457.817.954,00	6.658.290.166,00	2.200.472.212,00	
5.06.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	4.457.817.954,00	6.658.290.166,00	2.200.472.212,00	
5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	315.082.000,00	1.916.215.780,00	1.601.133.780,00	
5.06.02.2.01	Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	106.377.200,00	106.377.200,00	0,00	
5.06.02.2.01.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	52.910.800,00	52.910.800,00	0,00	
5.06.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	53.466.400,00	53.466.400,00	0,00	
5.06.02.2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	104.352.400,00	1.705.486.180,00	1.601.133.780,00	
5.06.02.2.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	50.886.000,00	1.652.019.780,00	1.601.133.780,00	
5.06.02.2.02.0002	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	53.466.400,00	53.466.400,00	0,00	
5.06.02.2.03	Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	104.352.400,00	104.352.400,00	0,00	
5.06.02.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	50.886.000,00	50.886.000,00	0,00	
5.06.02.2.03.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	53.466.400,00	53.466.400,00	0,00	
5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.142.735.954,00	4.742.074.386,00	599.338.432,00	
5.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.557.817.954,00	4.157.157.656,00	599.339.702,00	
5.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.557.817.954,00	4.157.157.656,00	599.339.702,00	
5.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
5.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
5.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	522.983.000,00	506.736.730,00	-16.246.270,00	
5.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.007.230,00	55.128.960,00	31.121.730,00	
5.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.100.570,00	50.100.570,00	0,00	
5.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.290.000,00	25.290.000,00	0,00	
5.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	423.585.200,00	376.217.200,00	-47.368.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.520.000,00	8.520.000,00	0,00	
5.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.520.000,00	8.520.000,00	0,00	
5.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.415.000,00	33.660.000,00	16.245.000,00	
5.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.415.000,00	33.660.000,00	16.245.000,00	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	12.171.036.774,00	25.855.656.241,00	13.684.619.467,00	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	12.171.036.774,00	25.855.656.241,00	13.684.619.467,00	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.832.404.900,00	2.912.861.100,00	1.080.456.200,00	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.677.524.900,00	2.644.645.100,00	967.120.200,00	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	47.671.000,00	104.571.000,00	56.900.000,00	
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	250.000.000,00	381.695.000,00	131.695.000,00	
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	281.221.000,00	449.487.000,00	168.266.000,00	
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	97.228.000,00	465.636.000,00	368.408.000,00	
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	812.344.900,00	728.137.300,00	-84.207.600,00	
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	20.850.000,00	149.600.000,00	128.750.000,00	
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	168.210.000,00	365.518.800,00	197.308.800,00	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	154.880.000,00	268.216.000,00	113.336.000,00	
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	63.800.000,00	54.640.000,00	-9.160.000,00	
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	91.080.000,00	213.576.000,00	122.496.000,00	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	900.715.000,00	2.564.750.900,00	1.664.035.900,00	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	281.910.000,00	281.115.000,00	-795.000,00	
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	281.910.000,00	281.115.000,00	-795.000,00	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	618.805.000,00	2.283.635.900,00	1.664.830.900,00	
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	54.400.000,00	1.532.165.900,00	1.477.765.900,00	
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	321.400.000,00	191.945.000,00	-129.455.000,00	
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	34.795.000,00	187.425.000,00	152.630.000,00	
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	208.210.000,00	372.100.000,00	163.890.000,00	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.437.916.874,00	20.378.044.241,00	10.940.127.367,00	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.508.236.424,00	13.947.634.541,00	5.439.398.117,00	
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.508.236.424,00	13.947.634.541,00	5.439.398.117,00	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	270.845.000,00	2.267.870.000,00	1.997.025.000,00	
6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	21.468.000,00	96.240.000,00	74.772.000,00	
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	249.377.000,00	2.171.630.000,00	1.922.253.000,00	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	475.285.450,00	1.474.435.700,00	999.150.250,00	
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.643.000,00	279.456.500,00	180.813.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.999.450,00	56.760.000,00	26.760.550,00	
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	346.643.000,00	1.138.219.200,00	791.576.200,00	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	136.180.000,00	2.600.814.000,00	2.464.634.000,00	
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	86.000.000,00	2.346.760.000,00	2.260.760.000,00	
6.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	50.180.000,00	254.054.000,00	203.874.000,00	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.370.000,00	87.290.000,00	39.920.000,00	
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.660.000,00	33.660.000,00	0,00	
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.710.000,00	53.630.000,00	39.920.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				
7.01	KECAMATAN	52.907.334.802,00	64.177.661.022,00	11.270.326.220,00	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Malinau Kota	4.668.431.793,00	6.394.695.727,00	1.726.263.934,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	107.950.000,00	419.892.000,00	311.942.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	107.950.000,00	419.892.000,00	311.942.000,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	107.950.000,00	419.892.000,00	311.942.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	99.996.000,00	128.312.000,00	28.316.000,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	99.996.000,00	128.312.000,00	28.316.000,00	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	99.996.000,00	128.312.000,00	28.316.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.460.485.793,00	5.846.491.727,00	1.386.005.934,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.026.939.723,00	5.494.943.157,00	1.468.003.434,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.026.939.723,00	5.494.943.157,00	1.468.003.434,00	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	38.560.000,00	38.560.000,00	0,00	
7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	38.560.000,00	38.560.000,00	0,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	299.988.440,00	217.990.940,00	-81.997.500,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199.997.440,00	117.999.940,00	-81.997.500,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.991.000,00	99.991.000,00	0,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.997.630,00	94.997.630,00	0,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.998.630,00	59.998.630,00	0,00	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.999.000,00	34.999.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Malinau Utara	4.928.362.038,00	5.411.973.540,00	483.611.502,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	261.676.800,00	550.553.600,00	288.876.800,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	261.676.800,00	550.553.600,00	288.876.800,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	261.676.800,00	550.553.600,00	288.876.800,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14.960.000,00	14.960.000,00	0,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	14.960.000,00	14.960.000,00	0,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14.960.000,00	14.960.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	29.685.000,00	29.685.000,00	0,00	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	29.685.000,00	29.685.000,00	0,00	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	29.685.000,00	29.685.000,00	0,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	29.920.000,00	63.750.000,00	33.830.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	29.920.000,00	63.750.000,00	33.830.000,00	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	29.920.000,00	63.750.000,00	33.830.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.592.120.238,00	4.753.024.940,00	160.904.702,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.396.740.768,00	4.396.745.240,00	4.472,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.396.740.768,00	4.396.745.240,00	4.472,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	63.129.080,00	63.149.230,00	20.150,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.257.580,00	55.792.580,00	7.535.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.871.500,00	7.356.650,00	-7.514.850,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.287.470,00	237.433.270,00	111.145.800,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.259.470,00	59.258.270,00	11.998.800,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	79.028.000,00	178.175.000,00	99.147.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.962.920,00	55.697.200,00	49.734.280,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.962.920,00	55.697.200,00	49.734.280,00	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Malinau Barat	4.292.824.039,00	4.792.810.525,00	499.986.486,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	149.999.800,00	149.999.800,00	0,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	149.999.800,00	149.999.800,00	0,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	149.999.800,00	149.999.800,00	0,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	130.535.550,00	630.535.250,00	499.999.700,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	130.535.550,00	630.535.250,00	499.999.700,00	
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	29.971.000,00	29.971.000,00	0,00	
7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	100.564.550,00	600.564.250,00	499.999.700,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.012.288.689,00	4.012.275.475,00	-13.214,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.817.304.170,00	3.892.804.170,00	75.500.000,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.817.304.170,00	3.892.804.170,00	75.500.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	97.850.500,00	22.350.500,00	-75.500.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.444.000,00	14.944.000,00	-75.500.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.406.500,00	7.406.500,00	0,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.304.019,00	92.290.805,00	-13.214,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.398.605,00	48.398.605,00	0,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.905.414,00	43.892.200,00	-13.214,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.830.000,00	4.830.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.830.000,00	4.830.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Malinau Selatan	2.948.433.398,00	4.057.025.238,00	1.108.591.840,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	368.440.000,00	477.420.000,00	108.980.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	368.440.000,00	477.420.000,00	108.980.000,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	368.440.000,00	477.420.000,00	108.980.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14.960.000,00	62.900.000,00	47.940.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	14.960.000,00	62.900.000,00	47.940.000,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14.960.000,00	62.900.000,00	47.940.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	24.990.000,00	226.880.000,00	201.890.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	24.990.000,00	226.880.000,00	201.890.000,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	24.990.000,00	226.880.000,00	201.890.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.540.043.398,00	3.289.825.238,00	749.781.840,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.448.443.648,00	3.057.036.288,00	608.592.640,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.448.443.648,00	3.057.036.288,00	608.592.640,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	75.599.750,00	197.108.950,00	121.509.200,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.000.000,00	91.222.500,00	55.222.500,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000,00	36.250.000,00	1.250.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.599.750,00	69.636.450,00	65.036.700,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.000.000,00	35.680.000,00	19.680.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.000.000,00	35.680.000,00	19.680.000,00	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Mentarang	4.202.206.464,00	4.672.506.014,00	470.299.550,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	50.000.000,00	99.982.000,00	49.982.000,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	50.000.000,00	99.982.000,00	49.982.000,00	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	99.982.000,00	49.982.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	266.340.000,00	573.630.000,00	307.290.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	266.340.000,00	573.630.000,00	307.290.000,00	
7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	266.340.000,00	573.630.000,00	307.290.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.885.866.464,00	3.998.894.014,00	113.027.550,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.702.206.539,00	3.702.207.064,00	525,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.702.206.539,00	3.702.207.064,00	525,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	70.005.472,00	146.099.950,00	76.094.478,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.007.872,00	61.025.000,00	46.017.128,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.999.600,00	25.076.950,00	77.350,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.998.000,00	59.998.000,00	30.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.670.215,00	50.610.000,00	4.939.785,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.000.215,00	18.410.000,00	-14.590.215,00	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.670.000,00	32.200.000,00	19.530.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.984.238,00	99.977.000,00	31.992.762,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.984.238,00	99.977.000,00	31.992.762,00	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Mentarang Hulu	2.563.727.460,00	3.277.296.478,00	713.569.018,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	200.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	200.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	200.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	35.000.000,00	185.000.000,00	150.000.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	20.000.000,00	170.000.000,00	150.000.000,00	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	20.000.000,00	170.000.000,00	150.000.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	166.320.000,00	206.000.000,00	39.680.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	166.320.000,00	206.000.000,00	39.680.000,00	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	166.320.000,00	206.000.000,00	39.680.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.162.407.460,00	2.486.296.478,00	323.889.018,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.087.407.460,00	2.277.296.478,00	189.889.018,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.087.407.460,00	2.277.296.478,00	189.889.018,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	50.000.000,00	150.340.000,00	100.340.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000,00	150.340.000,00	100.340.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	33.660.000,00	33.660.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	33.660.000,00	33.660.000,00	
7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pujungan	3.623.502.078,00	4.247.182.078,00	623.680.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	150.360.000,00	368.900.000,00	218.540.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	150.360.000,00	368.900.000,00	218.540.000,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	150.360.000,00	368.900.000,00	218.540.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	37.310.000,00	80.210.000,00	42.900.000,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	37.310.000,00	80.210.000,00	42.900.000,00	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	37.310.000,00	80.210.000,00	42.900.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	165.190.000,00	363.920.000,00	198.730.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	165.190.000,00	363.920.000,00	198.730.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	90.540.000,00	176.960.000,00	86.420.000,00	
7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	74.650.000,00	186.960.000,00	112.310.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.270.642.078,00	3.434.152.078,00	163.510.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.147.182.079,00	3.147.182.079,00	0,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.147.182.079,00	3.147.182.079,00	0,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.559.999,00	186.969.999,00	106.410.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.559.999,00	20.567.999,00	8.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.000.000,00	166.402.000,00	106.402.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.900.000,00	100.000.000,00	57.100.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.900.000,00	100.000.000,00	57.100.000,00	
7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Kayan Hilir	3.192.125.887,00	3.779.203.392,00	587.077.505,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	47.112.000,00	48.776.000,00	1.664.000,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	47.112.000,00	48.776.000,00	1.664.000,00	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	47.112.000,00	48.776.000,00	1.664.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.145.013.887,00	3.730.427.392,00	585.413.505,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.579.402.887,00	2.802.048.892,00	222.646.005,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.579.402.887,00	2.802.048.892,00	222.646.005,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	531.951.000,00	894.718.500,00	362.767.500,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.787.000,00	30.051.500,00	264.500,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.598.000,00	98.194.000,00	49.596.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.849.000,00	14.797.000,00	-10.052.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	428.717.000,00	751.676.000,00	322.959.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.660.000,00	33.660.000,00	0,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.660.000,00	33.660.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan kayan Hulu	3.960.206.540,00	4.962.123.741,00	1.001.917.201,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	54.610.000,00	201.971.600,00	147.361.600,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	54.610.000,00	201.971.600,00	147.361.600,00	
7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	54.610.000,00	201.971.600,00	147.361.600,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.905.596.540,00	4.760.152.141,00	854.555.601,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.484.109.553,00	3.962.359.691,00	478.250.138,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.484.109.553,00	3.962.359.691,00	478.250.138,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	325.486.987,00	797.792.450,00	472.305.463,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.002.500,00	20.461.500,00	-14.541.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.544.487,00	277.916.950,00	217.372.463,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	229.940.000,00	499.414.000,00	269.474.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Sungai Boh	4.107.831.405,00	5.143.547.091,00	1.035.715.686,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	248.503.500,00	411.487.500,00	162.984.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	248.503.500,00	411.487.500,00	162.984.000,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	248.503.500,00	411.487.500,00	162.984.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	34.790.000,00	34.790.000,00	0,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	34.790.000,00	34.790.000,00	0,00	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	34.790.000,00	34.790.000,00	0,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	80.750.000,00	271.575.000,00	190.825.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	80.750.000,00	271.575.000,00	190.825.000,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	23.200.000,00	51.125.000,00	27.925.000,00	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	57.550.000,00	220.450.000,00	162.900.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.743.787.905,00	4.425.694.591,00	681.906.686,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.557.831.405,00	4.206.547.091,00	648.715.686,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.557.831.405,00	4.206.547.091,00	648.715.686,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	185.956.500,00	219.147.500,00	33.191.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.306.500,00	53.262.500,00	-17.044.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	86.450.000,00	136.685.000,00	50.235.000,00	
7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Bahau Hulu	2.763.619.804,00	3.611.803.162,00	848.183.358,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	150.160.000,00	190.180.000,00	40.020.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	150.160.000,00	190.180.000,00	40.020.000,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	150.160.000,00	190.180.000,00	40.020.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	30.000.000,00	65.850.000,00	35.850.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	30.000.000,00	65.850.000,00	35.850.000,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30.000.000,00	65.850.000,00	35.850.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14.800.000,00	161.420.000,00	146.620.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14.800.000,00	161.420.000,00	146.620.000,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	14.800.000,00	161.420.000,00	146.620.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	74.825.000,00	234.750.000,00	159.925.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	74.825.000,00	234.750.000,00	159.925.000,00	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	74.825.000,00	234.750.000,00	159.925.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	79.732.000,00	120.582.000,00	40.850.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	79.732.000,00	120.582.000,00	40.850.000,00	
7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	79.732.000,00	120.582.000,00	40.850.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.414.102.804,00	2.839.021.162,00	424.918.358,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.288.342.554,00	2.691.506.720,00	403.164.166,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.288.342.554,00	2.691.506.720,00	403.164.166,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.760.250,00	66.514.442,00	-14.245.808,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.714.000,00	21.978.000,00	11.264.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.046.250,00	44.536.442,00	-25.509.808,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.000.000,00	81.000.000,00	36.000.000,00	
7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	45.000.000,00	81.000.000,00	36.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Kayan Selatan	3.204.729.946,00	3.979.217.855,00	774.487.909,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	207.050.000,00	390.540.000,00	183.490.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	207.050.000,00	390.540.000,00	183.490.000,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	207.050.000,00	390.540.000,00	183.490.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	62.100.000,00	100.000.000,00	37.900.000,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	62.100.000,00	100.000.000,00	37.900.000,00	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	62.100.000,00	100.000.000,00	37.900.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	119.960.000,00	155.280.000,00	35.320.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	119.960.000,00	155.280.000,00	35.320.000,00	
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	39.800.000,00	52.700.000,00	12.900.000,00	
7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	80.160.000,00	102.580.000,00	22.420.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.815.619.946,00	3.333.397.855,00	517.777.909,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.654.730.557,00	2.979.218.688,00	324.488.131,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.654.730.557,00	2.979.218.688,00	324.488.131,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	125.209.389,00	318.499.167,00	193.289.778,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.211.000,00	57.245.400,00	32.034.400,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.998.389,00	261.253.767,00	161.255.378,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.680.000,00	35.680.000,00	0,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.680.000,00	35.680.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Sungai Tubu	2.751.099.086,00	3.148.042.167,00	396.943.081,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	130.188.000,00	157.690.500,00	27.502.500,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	130.188.000,00	157.690.500,00	27.502.500,00	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	24.998.000,00	24.998.000,00	0,00	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	55.200.000,00	55.214.500,00	14.500,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	49.990.000,00	77.478.000,00	27.488.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.620.911.086,00	2.990.351.667,00	369.440.581,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.853.658.086,00	2.148.050.317,00	294.392.231,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.853.658.086,00	2.148.050.317,00	294.392.231,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	577.993.000,00	795.761.350,00	217.768.350,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.183.000,00	34.181.500,00	-1.500,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	143.000.000,00	143.000.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	990.000,00	1.229.850,00	239.850,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	399.820.000,00	617.350.000,00	217.530.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.260.000,00	46.540.000,00	-142.720.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	189.260.000,00	46.540.000,00	-142.720.000,00	
7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Malinau Selatan Hilir	2.973.528.697,00	3.473.528.547,00	499.999.850,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	201.795.000,00	589.140.000,00	387.345.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	201.795.000,00	589.140.000,00	387.345.000,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	201.795.000,00	589.140.000,00	387.345.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	39.989.000,00	50.000.000,00	10.011.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	39.989.000,00	50.000.000,00	10.011.000,00	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	39.989.000,00	50.000.000,00	10.011.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.731.744.697,00	2.834.388.547,00	102.643.850,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.521.762.547,00	2.492.062.547,00	-29.700.000,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.473.562.547,00	2.473.562.547,00	0,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48.200.000,00	18.500.000,00	-29.700.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.000.000,00	174.526.000,00	114.526.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	124.526.000,00	94.526.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.982.150,00	167.800.000,00	17.817.850,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	149.982.150,00	167.800.000,00	17.817.850,00	
7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Malinau Selatan Hulu	2.726.706.167,00	3.226.705.467,00	499.999.300,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	54.783.000,00	297.500.000,00	242.717.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	54.783.000,00	297.500.000,00	242.717.000,00	
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	30.083.000,00	195.500.000,00	165.417.000,00	
7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	24.700.000,00	102.000.000,00	77.300.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.671.923.167,00	2.929.205.467,00	257.282.300,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.226.706.467,00	2.226.706.467,00	0,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.226.706.467,00	2.226.706.467,00	0,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.156.700,00	396.819.000,00	306.662.300,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.724.500,00	165.276.000,00	133.551.500,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.517.200,00	198.043.000,00	148.525.800,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.915.000,00	33.500.000,00	24.585.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.360.000,00	35.680.000,00	-35.680.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.360.000,00	35.680.000,00	-35.680.000,00	
7.01.01.2.13	Penataan Organisasi	211.200.000,00	270.000.000,00	58.800.000,00	
7.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	211.200.000,00	270.000.000,00	58.800.000,00	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.882.385.433,00	46.620.003.169,00	39.737.617.736,00	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.882.385.433,00	46.620.003.169,00	39.737.617.736,00	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	44.971.000,00	882.905.893,00	837.934.893,00	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	44.971.000,00	882.905.893,00	837.934.893,00	
8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	44.971.000,00	45.000.000,00	29.000,00	
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	0,00	737.905.893,00	737.905.893,00	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.572.776.000,00	37.401.382.184,00	35.828.606.184,00	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.572.776.000,00	37.401.382.184,00	35.828.606.184,00	
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.520.010.500,00	235.000.000,00	-1.285.010.500,00	
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	52.765.500,00	37.066.382.184,00	37.013.616.684,00	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	72.428.250,00	1.009.999.450,00	937.571.200,00	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	72.428.250,00	1.009.999.450,00	937.571.200,00	
8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0,00	249.999.450,00	249.999.450,00	
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	44.657.750,00	110.000.000,00	65.342.250,00	
8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	27.770.500,00	650.000.000,00	622.229.500,00	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	70.651.500,00	1.261.673.000,00	1.191.021.500,00	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	70.651.500,00	1.261.673.000,00	1.191.021.500,00	
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	31.723.000,00	9.983.000,00	-21.740.000,00	
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	9.008.500,00	124.000.000,00	114.991.500,00	
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	29.920.000,00	627.690.000,00	597.770.000,00	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.121.558.683,00	6.064.042.642,00	942.483.959,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.337.000,00	166.000.000,00	130.663.000,00	
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.337.000,00	166.000.000,00	130.663.000,00	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.743.264.083,00	5.464.129.042,00	720.864.959,00	
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.743.264.083,00	5.464.129.042,00	720.864.959,00	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	316.057.600,00	406.919.600,00	90.862.000,00	
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.997.500,00	65.000.000,00	13.002.500,00	
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.993.000,00	54.993.000,00	0,00	
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.999.600,00	57.999.600,00	0,00	
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.067.500,00	228.927.000,00	77.859.500,00	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.900.000,00	26.994.000,00	94.000,00	
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.900.000,00	26.994.000,00	94.000,00	